

ABSTRAK

Program parkir berlangganan adalah program yang diberikan Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar kepada masyarakat dalam menangani parkir di wilayah Kabupaten Blitar dengan memberikan wajib pajak kepada masyarakat setiap setahun sekali pada saat membayar pajak kendaraan bermotor tahunan. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui peran Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar dalam melaksanakan program parkir berlangganan di wilayah Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar dengan tujuan untuk mengetahui pemahaman masyarakat mengenai program parkir berlangganan yang berjalan, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan menggunakan pengambilan data secara wawancara, observasi dan pengambilan data menggunakan kuesioner pertanyaan terbuka.

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai bahan pertimbangan dan tolak ukur Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar dalam upaya meningkatkan kelancaran program parkir berlangganan dan secara tidak langsung ikut mensosialisasikan program parkir berlangganan kepada masyarakat serta meningkatkan kinerja juru parkir karena dalam penelitian ini juga mengingatkan tentang tugas dan aturan juru parkir sesuai dengan aturan yang berlaku.

Hasil dari penelitian ini adalah mengetahui tingkat pengetahuan masyarakat tentang apa dan bagaimana program parkir berlangganan berjalan juga memberikan pemahaman secara tidak langsung kepada masyarakat pada umumnya, menuangkan segala keluhan kesah masyarakat dan juru parkir tentang program tersebut diantaranya kurangnya tenaga juru parkir resmi di wilayah Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar dan keluhan masyarakat tentang retribusi parkir yang masih harus dibayarkan

Kata Kunci : program parkir berlangganan, dinas perhubungan, masyarakat, juru parkir, sosialisasi, retribusi.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Program parkir berlangganan merupakan sebuah upaya meningkatkan efektifitas pendapatan daerah khususnya di Wilayah Kabupaten Blitar, sebelum adanya program parkir berlangganan pemerintah menggunakan sistim konvensional yang dimana setiap masyarakat yang parkir wajib membayar retribusi dan mendapatkan karcis sebagai jaminan keselamatan tapi pada kenyataanya di lapangan oknum juru parkir nakal tidak memberikan karcis tersebut agar mendapat untung lebih dan tidak menyetorkan jumlah rekap karcis sepenuhnya dengan adanya program parkir berlangganan sangat efektif dalam meningkatkan pendapatan daerah dan menekan kecurangan oknum parkir yang tidak bertanggung jawab.

Dengan cara menetapkan pajak tahunan yang dibayarkan setahun sekali di SAMSAT (Sistim Administrasi Manunggal Satu Atap) setiap membayar pajak kendaraan bermotor tahunan sebesar Rp.15.000,00 (limabelas ribu rupiah) bagi kendaraan bermotor yang berkode nomor kendaraan Kabupaten Blitar. Dengan program ini pendapatan daerah meningkat dengan drastis dari semula pertahunnya hanya sebesar ± Rp.30.000.000,00 (tigapuluh juta rupiah) menjadi ± Rp7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah) ditambah pendapatan karcis konvensional kendaraan bermotor berkode plat luar wilayah Kabupaten Blitar. Agar mendapat jaminan retribusi dan keamanan pada saat melakukan kegiatan parkir di tepi jalan. Retribusi parkir adalah fasilitas di bahu jalan umum yang disediakan oleh pemerintah daerah sebagai tempat parkir, pengenaan tarif parkir berdasarkan jenis kendaraan yang digunakan oleh masyarakat. Setiap masyarakat yang menggunakan jasa parkir akan merasakan pelayanan parkir yang dilakukan oleh juru parkir (Gustika,Gita. 2018: 144)

Banyak permasalahan yang dihadapi dan pembenahan yang harus dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar dalam menjalankan tugas

dan program yang di jalankan salah satunya pungutan retribusi parkir liar oleh juru parkir ilegal yang dapat di lihat dengan jelas di media sosial Facebook Info Cegatan Blitar (ICB) yang merupakan wadah masyarakat Blitar dalam berbagi informasi dan pendapat pada wilayah Blitar khususnya. Pengaruh pungutan retribusi parkir liar juga mempengaruhi citra Dinas Perhubungan dimata masyarakat karena masyarakat menganggap program parkir berlangganan tidak ada gunanya dan seakan cuma menjadi wadah untuk mencari keuntungan semata serta permasalahan lain yang timbul akibat kurangnya pengetahuan masyarakat tentang program parkir berlangganan. Di dalam penelitian ini akan membahas peran Dinas perhubungan dalam menyelesaikan permasalahan pengelolaan parkir di wilayah Kabupaten Blitar khususnya di wilayah Kecamatan Wlingi.

Juru parkir yang disebut juga sebagai Jukir adalah orang yang membantu mengatur kendaraan yang keluar masuk ke tempat parkir. Jukir juga berfungsi untuk mengumpulkan biaya parkir dan memberikan karcis kepada pengguna parkir pada saat akan keluar dari ruang parkir (Aldino, Azjandri. 2017). Parkir merupakan salah satu hal yang penting dalam penataan sebuah daerah. Tentunya harus dengan sistim yang tepat dan benar, bukan sebuah hal yang dapat dipandang sebelah mata. Dalam penanganan parkir yang tepat dan benar dapat meningkatkan Anggaran Pendapatan Daerah (APD) yang luar biasa.

Tarif parkir pada lokasi yang demikian biasanya tarif *fixed* atau tidak tergantung waktu karena karcis tidak dilengkapi dengan waktu kedatangan dan waktu kendaraan meninggalkan ruang parkir. Permasalahan retribusi parkir khususnya di Kabupaten Blitar seakan menjadi permasalahan yang tidak mudah diselesaikan. Mulai dari tidak pahamnya masyarakat tentang Progam Parkir Berlangganan, serta permasalahan retribusi parkir di tepi jalan umum yang aturannya sering disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung-jawab yang menggunakan momen tersebut untuk meraup keuntungan. Dalam hal ini penelitian bertujuan untuk memberikan gambaran dan dampak yang ditimbulkan oleh juru parkir liar di Kabupaten Blitar

khususnya di Kecamatan Wlingi baik dalam perbuatan dan tindakan serta peran Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar dalam menjalankan Program Parkir Berlangganan di Wilayah Kabupaten Blitar khususnya di Wilayah Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar tersebut. Hasil ini diperoleh berdasarkan kemampuan nalar dalam menghubungkan fakta, data, dan informasi yang didapat selama penelitian. Penelitian ini dilakukan di wilayah kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian yang berkaitan dengan Program Parkir Berlangganan dan mengangkat judul **“Peran Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar Dalam Melaksanakan Program Parkir Berlangganan Di Wilayah Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar”**.

1.2 Rumusan Masalah

Dari berbagai masalah yang telah diuraikan di atas maka peneliti mengambil Rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar dalam melaksanakan Program Parkir Berlangganan di wilayah Kecamatan Wlingi?
2. Bagaimana kondisi di lapangan tentang program parkir berlangganan di Kabupaten Blitar khususnya wilayah Kecamatan Wlingi?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Bertumpu pada fokus penelitian di atas, maka tujuan utama dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar Dalam menjalankan Program Parkir Berlangganan di Kabupaten Blitar khususnya di Kecamatan Wlingi. Sedangkan yang menjadi tujuan khusus adalah :

1. Guna mengetahui dan menganalisis Program Parkir Berlangganan di Kabupaten Blitar khususnya di Kecamatan Wlingi.

2. Guna mengetahui dan menganalisis faktor pendukung program parkir berlangganan di Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar.
3. Serta mengetahui dan menganalisis bagaimana mengatasi permasalahan Program Parkir Berlangganan di Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar.

Sedangkan yang menjadi manfaat dan kegunaan, antara lain:

1. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini dapat digunakan untuk mahasiswa untuk menerapkan sebuah teori-teori yang pernah didapatkan selama menempuh pendidikan di bangku perkuliahan dan mengaplikasikan kenyataan yang ada, serta menambah pengalaman dan pengetahuan penulis akan masalah-masalah yang terjadi pada kegiatan-kegiatan transportasi khususnya dibidang perparkiran. Guna memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Transportasi di Universitas Maritim AMNI Semarang.

2. Bagi Instansi

Penelitian ini diharapkan memberikan serta menghasilkan informasi dan referensi bagi UNIMAR AMNI Semarang tentang Program Parkir Berlangganan serta memberikan citra positif terhadap lembaga karena peneliti diharapkan dapat menyelesaikan sebuah persoalan transportasi di suatu wilayah dengan memberikan saran dan masukan,

3. Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dari keberhasilan program yang dilakukan oleh pemerintah dalam melaksanakan program parkir berlangganan di wilayah Kabupaten Blitar dan meningkatkan pengelolaan transportasi yang ada dan dapat memaksimalkan pendapatan daerah.

4. Bagi Pembaca

Dengan adanya penelitian ini dimaksudkan agar pembaca dan peneliti generasi selanjutnya dapat dijadikan sebuah referensi dipenelitian bidang transportasi darat khususnya di bidang parkir dan dapat memahami maksud arti dari program parkir berlangganan.

1.4 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang cukup jelas tentang skripsi ini maka di susunlah suatu sistematika penulisan yang berisi mengenai informasi materi serta hal-hal yang berhubungan dengan proposal ini, penulisan skripsi ini diusahakan secara sistematis sehingga mudah untuk dipahami oleh pembaca. Sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut:

Bab 1 PENDAHULUAN

Membahas tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab 2 TINJAUAN PUSTAKA

Membahas tentang pengertian dan jenis-jenis parkir, pengertian dan tujuan Dinas Perhubungan serta pengertian dan tujuan SAMSAT, penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran.

Bab 3 METODOLOGI PENELITIAN

Membahas tentang langkah-langkah yang dilakukan dalam rencana kerja penelitian, sehingga penelitian dilakukan secara benar yang meliputi desain penelitian, data dan sumber data, subjek penelitian, instrumen dan kisi-kisi penelitian, teknik pengumpulan, analisis data, dan pemeriksaan keabsahan data.

Bab 4 HASIL DAN PEMBAHASAN

Merupakan bab yang menguraikan gambaran umum, dan menguraikan tentang data-data yang diperoleh dari informan terkait. Serta merupakan bab yang menguraikan pembahasan hasil temuan di lapangan yang kemudian dilakukan pembahasan yang mendalam.

Bab 5 PENUTUP

Menguraikan tentang kesimpulan dan saran yang diperoleh dari hasil penelitian. Saran dapat ditujukan kepada instansi yang terkait dalam penelitian.

Daftar Pustaka

Lampiran

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Pustaka dan Penelitian Terdahulu

2.1.1 Parkir

Parkir merupakan salah satu prasarana jalan yang ada di suatu wilayah. Menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan oleh pengemudinya. Meningkatnya jumlah kendaraan bermotor baik kendaraan roda dua maupun roda empat, mengakibatkan kebutuhan terhadap lahan parkir yang ada di tepi jalan umum juga meningkat. Meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap lahan parkir di tepi jalan umum juga harus disesuaikan dengan kondisi jalan yang ada di suatu wilayah.

Pengaturan tentang parkir di tepi jalan umum diatur di beberapa peraturan perundangundangan. Dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan dinyatakan bahwa, setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan dalam memanfaatkan jalan serta dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang milik jalan yang mengganggu aktivitas jalan raya dalam berlalu lintas. Penyediaan fasilitas parkir diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dinyatakan bahwa, penyediaan fasilitas parkir di tepi jalan umum, hanya dapat diselenggarakan di luar ruang milik jalan sesuai dengan izin yang diberikan. Sesuai dengan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, penetapan lokasi dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dengan memperhatikan rencana umum tata ruang, analisis dampak lalu lintas dan kemudahan bagi pengguna jasa (D.N Siregar, Yanis Rinaldi, 2017:195)

Parkir pada dasarnya merupakan sebuah hal yang sangat penting dan harus diperhatikan, dalam penanganan parkir pemerintah harus bisa mengerti

dalam pengelolaannya agar tidak menimbulkan gangguan lalu-lintas, kebutuhan parkir di jalan raya sangat berpengaruh pada tingkat aktifitas di suatu wilayah seperti halnya di Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar yang sangat membutuhkan pengelolaan dengan baik karena di tempat tersebut merupakan sektor pusat perbelanjaan dan taman hiburan.

2.1.2 Jenis-Jenis Parkir

Ada empat jenis parkir menurut Arthur Daniel Limantara (2017:04), yaitu:

1. Parkir di ruang milik jalan (on-street)

Adalah ruang parkir pada jalan umum, parkir ini mengambil ruang milik jalan baik legal maupun ilegal (biasanya mengambil ruang peruntukan pejalan kaki dalam hal ini sering kali menyebabkan kemacetan)



Gambar 2.1. Parkir On-street legal

2. Parkir umum diluar ruang milik jalan (public off-street) Parkir umum tidak diruang milik jalan dan penggunaan untuk semua anggota masyarakat dengan ketentuan yang diberlakukan seperti waktu parkir maksimum atau pengenaan biaya parkir dan lain-lain.



Gambar 2.2. Parkir Umum Off-street

3. Parkir swasta non-residensial di luar ruang milik jalan (private non-residential offstreet) Parkir yang umumnya banyak dijumpai pada pusat-pusat perbelanjaan atau perkantoran.



Gambar 2.3. Parkir Perbelanjaan

4. Parkir pribadi dalam permukiman (private residential parking) Jenis ini dapat ditemui pada gedung yang terkait dengan pemukiman atau rumah susun (apartemen), sifatnya hanya penghuni yang dapat memanfaatkannya

2.1.3 Parkir Liar

Parkir liar dapat memengaruhi tingkat pendapatan pemilik usaha, Semakin banyak parkir liar mengambil kuasa dalam lahan parkir padahal tidak ada ijin dari pemerintah untuk dia mengutip biaya parkir di daerah tersebut, tetapi seolah-olah dia adalah juru parkir yang legal. Parkir ini

terkadang menaikkan biaya parkir kendaraan sehingga masyarakat pun terbebani dan enggan datang kembali ke tempat pembelanjaan tersebut dan memilih tempat lain untuk berbelanja, sehingga menyebabkan pendapatan pemilik usaha menurun. (Rihan Varizie, 2019:274)

Banyaknya jumlah kendaraan bermotor ini tentu saja menyisakan banyak persoalan. Selain menambah tingkat konsumsi bahan bakar, membludaknya jumlah kendaraan bermotor ini juga memunculkan permasalahan baru yaitu kemacetan dan pengelolaan parkir. (Hendrawan Toni Taruno 2017:187)

Dapat dilihat dalam pembahasan penelitian ini bagaimana peran Dinas Perhubungan Dalam menangani Parkir liar di wilayah Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar yang sebenarnya dapat terselesaikan dengan program parkir berlangganan dengan memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang parkir dan melarang tegas Juru parkir liar.

2.2 Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan menurut Ayu Widayati, (2016:06) dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi sebagai: (a) Perumus kebijakan teknis pelaksanaan dibidang perhubungan, (b) Pelaksana pembinaan operasional dibidang perhubungan, (c) Pengendali dan pengawas teknis dibidang perhubungan, (d) Pemberi bimbingan teknis dibidang perhubungan, (e) Pemberian ijin dan pelaksanaan pelayanan umum, (f) Pelaksana Rumah Tangga dan Tata Usaha Dinas Perhubungan, dan (g) Penindak pelanggaran Lalu Lintas berkaitan surat tilang didasarkan atas hasil temuan dalam proses pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan, hasil laporan, dan hasil rekaman peralatan elektronik.

Dalam penjabaran fungsi Dinas Perhubungan sebagai perumus kebijakan serta pelaksanaan pembinaan tentunya dalam penelitian ini sangatlah penting peran tersebut untuk menjalankan sistim program parkir berlangganan, faktor pendukung berjalannya suatu rencana atau kebijakan adalah instansi terkait yang berwenang.

2.2.1 Peran dan tugas Kepala Bidang dan Seksi Perparkiran

Kepala Bidang Manajemen Lalu Lintas mempunyai tugas menyusun rencana, program kerja, kebijakan teknis dibidang pengendalian, pengawasan dan melakukan manajemen dan pengawasan perparkiran untuk umum, serta melaksanakan manajemen dan rekayasa lalu lintas. Untuk melaksanakan tugas, Kepala Bidang Manajemen Lalu Lintas mempunyai fungsi:

- a. Mengkoordinasikan penyusunan rencana dan program kerja di bidang pengendalian dan pengawasan, manajemen dan rekayasa serta perparkiran untuk umum;
- b. Merumuskan kebijakan teknis di bidang pengendalian, pengawasan, perparkiran, manajemen dan rekayasa lalu lintas;
- c. Melaksanakan manajemen dan rekayasa lalu lintas;
- d. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan lalu lintas;
- e. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan manajemen parkir untuk umum;
- f. Memverifikasi dokumen analisis dampak lalu lintas;
- g. Menetapkan jaringan jalan kabupaten;
- h. Menginventarisasi daerah rawan kecelakaan;
- i. Melaksanakan tugas–tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya. *(Peraturan Pemerintah Daerah Tahun, 2014)*

Tugas dan Peran kepala bidang manajemen lalu-lintas sangatlah berpengaruh terhadap semua kebijakan yang telah dibuat bila dilaksanakan dengan tepat dan benar, termasuk dalam mengatur tentang bidang seksi perparkiran yang menetapkan Program Parkir Berlangganan. Diantara tugas dan kewenangan Seksi Perparkiran

Kepala Seksi Perparkiran mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program kerja, manajemen dan pengawasan, menetapkan lokasi serta pemberian rekomendasi fasilitas parkir untuk umum. Untuk melaksanakan tugas, Kepala Seksi Perparkiran mempunyai fungsi:

- a) Mengumpulkan data, menyusun rencana dan program kerja di bidang perparkiran;

- b) Merumuskan Kebijakan Teknis perparkiran di wilayah kabupaten;
- c) Melaksanakan perencanaan dan penetapan lokasi parkir untuk umum;
- d) Melaksanakan penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum;
- e) Memberikan rekomendasi izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum;
- f) Menghimpun dan menganalisa data guna pengelolaan dan manajemen parkir untuk umum;
- g) Mengadakan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan perparkiran baik yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten maupun pihak ketiga;
- h) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai bidang tugasnya.

(Sumber: Peraturan Pemerintah Daerah Tahun, 2014)

2.3 Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT)

Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) yang selanjutnya disebut Samsat adalah serangkaian kegiatan dalam penyelenggaraan Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara terintegrasi dan terkoordinasi dalam Kantor Bersama Samsat. (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015)

Menurut Rendi Ilhamsyah (2016:01) Pajak adalah sumber utama dari penerimaan negara dimana kegiatan negara seperti pembangunan nasional yang dibiayai dari pajak sulit dilaksanakan jika tidak adanya penerimaan dari sektor pajak. Dalam rangka efektifitas pemerataan pembangunan, Desentralisasi dari pemerintah pusat untuk mengawasi serta mengatur secara langsung urusan-urusan di daerah sangat dibutuhkan, sehingga kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan pembiayaan diberikan kepada pemerintah daerah.

Pajak menurut Siahaan yang di kutip oleh Rendi Ilhamsyah (2016:01) adalah pungutan terhadap masyarakat oleh negara berdasarkan undang-undang yang bersifat memaksa, dan terutang yang wajib dibayar dengan tidak mendapat imbalan secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Pajak dapat di pungut dalam berbagai bentuk dan akan kembali kepada masyarakat sendiri pajak sangatlah bermanfaat bagi masyarakat dan Negara, pembangunan daerah sangat terpengaruh terhadap pajak dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah (PAD) dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu : Pajak daerah, Retribusi daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Salah satu jenis pendapatan pajak daerah diantaranya didapat melalui pajak kendaraan bermotor (PKB). Pajak kendaraan bermotor merupakan pajak atas kepemilikan kendaraan bermotor.

Dalam program parkir berlangganan peran SAMSAT sangatlah penting sebagai pencatat pajak masuk kendaraan bermotor yang telah membayar pajak wajib, dalam penanganan program parkir berlangganan Dinas Perhubungan tidak bisa bekerja sendiri dalam pendataan pajak masuk peran SAMSAT sangat diperlukan karna hal ini merupakan tugas dan fungsi sebagai tempat pembayaran dan pendataan kendaraan bermotor.

2.3.1 Tujuan (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap) SAMSAT

Samsat bertujuan memberikan pelayanan Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, pembayaran pajak atas kendaraan bermotor, dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara terintegrasi dan terkoordinasi dengan cepat, tepat, transparan, akuntabel, dan informatif. (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015)

Prinsip konsistensi dalam pelayanan publik yang ada di Kantor SAMSAT Kabupaten Minsel sudah terlaksana dengan baik atau telah diuji prosedur pelayanan dengan hasil memuaskan dari ketetapan karakter dari

setiap pelayanan di Kantor SAMSAT Kabupaten Minsel. Karena ini semua berpengaruh terhadap kepuasan masyarakat di SAMSAT tentunya yang diharapkan mereka bahwa adanya konsistensi dari perusahaan yang membuat pelanggan disini merasa nyaman (R.T Regah, 2019:67)

Tugas SAMSAT bukan hanya memberikan pelayanan Registrasi dan Identifikasi kendaraan bermotor tetapi juga menangani segala bentuk persoalan tentang aturan-aturan kendaraan bermotor seperti halnya program parkir berlangganan yang harus tersampaikan dengan jelas kepada masyarakat pada umumnya dalam hal ini berpengaruh pada sistem pelayanan yang dilakukan.

2.4 Penelitian Terdahulu

Agar dalam penelitian menjadi pembeda dari penelitian yang lain, maka perlu adanya penelitian terdahulu untuk menjadi pembandingan. Sebagaimana penelitian ini menunjukkan tentang perencanaan Program Parkir Berlangganan di Kabupaten Blitar khususnya di Kecamatan Wlingi, sehingga dapat menjadi pembandingan antar peneliti satu dengan yang lainnya.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang penulis pilih maka dapat disimpulkan bahwa dalam penulisan mereka mempunyai kesamaan dalam subyeknya yaitu parkir, namun berbeda pada topik pembahasannya. Sedangkan dalam penelitian ini penulis ingin membahas tentang Program Parkir Berlangganan di Kabupaten Blitar khususnya di Kecamatan Wlingi.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang menjadi dasar dalam penelitian ini. Secara ringkas penelitian-penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya dapat dilihat pada tabel berdasarkan setiap jurnal yang dilakukan pada penelitian ini.

1. Rujukan Jurnal Dina Nurrahmah Siregar, Yanis Rinaldi (2017)

Penelitian Pertama, “PERANAN DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DALAM PELAKSANAAN PENGAWASAN PARKIR DI KOTA BANDA ACEH” Penelitian yang

dilakukan oleh Dina Nurrohmah dan Yanis Rinaldi menjelaskan bahwa Dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan dinyatakan bahwa, setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan dalam memanfaatkan jalan serta dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang milik jalan yang mengganggu aktivitas jalan raya dalam berlalu lintas. Pada tabel 2.1 dijelaskan secara ringkas yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Penelitian ini berfokus pada Fungsi Parkir

TABEL 2.1 Rujukan Penelitian Untuk Program Parkir Berlangganan

Judul	PERANAN DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DALAM PELAKSANAAN PENGAWASAN PARKIR DI KOTA BANDA ACEH
Nama Peneliti	Dina Nurrahmah Siregar dan Yanis Rinaldi
Metode Penelitian	Diperoleh melalui penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku, bahan internet dan hasil karya ilmiah lain yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini serta penelitian lapangan yang dilakukan untuk memperoleh data primer dengan mewawancarai responden dan informan.
Teknik Pengumpulan Data	Penelitian kepustakaan (library research) yang di dapat dalam buku-buku dan jurnal-jurnal terdahulu dan Penelitian lapangan (field research) melakukan wawancara dengan responden dan informan untuk memperoleh data yang di inginkan.
Teknik Analisis Data	Dalam menganalisa data, penulis menggunakan

	analisa data kualitatif.
Hasil Penelitian	Faktor internal antara lain pedoman teknis yang belum tersusun dengan rapi dan kurangnya petugas Dinas Perhubungan. Faktor Eksternal yaitu banyaknya juru parkir ilegal dan kurangnya kesadaran masyarakat
Hubungan Dengan Peneliti yang Sekarang	Berdasarkan Penelitian terdahulu, faktor penghambat dalam melaksanakan Program Parkir Berlangganan ialah kesadaran masyarakat akan sistim Program Parkir Berlangganan dan banyaknya parkir ilegal.

Sumber : Jurnal Yang Di Publikasikan Tahun 2017

2. Rujukan Jurnal Rihan Varizie, Talbani Farlian (2019)

Kedua, “ANALISIS PENGARUH PARKIR LIAR TERHADAP PENDAPATAN PEMILIK USAHA DI KOTA BANDA ACEH” Penelitian yang dilakukan oleh Rihan Varizie dan Talbani Farlian menjelaskan bahwa Salah satu penyebab terjadinya parkir tidak pada tempatnya adalah karena ketersediaan lahan parkir yang kurang memadai dan pengelolaan parkir yang kurang baik, contohnya seperti jalanan yang kurang lebar pada pusat pembelanjaan. Hal tersebut membuat masyarakat susah mencari tempat untuk memarkirkan kendaraan pribadinya Pada tabel 2.2 dijelaskan secara ringkas jurnal penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Penelitian ini berfokus pada Lahan Parkir

TABEL 2.2 Rujukan Penelitian Untuk Parkir

Judul	ANALISIS PENGARUH PARKIR LIAR TERHADAP PENDAPATAN PEMILIK USAHA DI KOTA BANDA ACEH
Nama Peneliti	Rihan Varizie dan Talbani Farlian

Metode Penelitian	Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif.
Teknis Pengumpulan Data	Penelitian ini menggunakan data primer dan data skunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik tahun 2010 Sampai 2017. Penelusuran pengumpulan data dapat diakses pada website maupun studi pustaka yang dilakukan di masing-masing instansi terkait.
Teknis Analisis Data	Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode kuisioner sebagai pengukur dan digunakan sebagai acuan untuk menunjang panjang pendeknya interval yang ada pada alat ukur.
Hasil Penelitian	Hasil penelitian menunjukkan bahwa parkir liar yang ada di tempat usaha responden tidak memberi dampak negatif terhadap pendapatan pemilik usaha.
Hubungan dengan peneliti yang sekarang	Berdasarkan penelitian terdahulu kebutuhan lahan parkir sangat di perlukan di tempat pusat perekonomian agar menekan adanya parkir illegal.

Sumber : Jurnal Yang Di Publikasikan Tahun 2019

3. Rujukan Jurnal Ryan T. Regah , Harijanto Sabjino , Sherly Pinatik (2019)

Ketiga, “ANALISIS PENDIDIKAN, PENGALAMAN KERJA DAN PELATIHAN PADA PELAYANAN APARATUR PAJAK DI UPTD SAMSAT AMURANG” Penelitian yang dilakukan oleh Ryan T.

Regah , Harijanto Sabjino , Sherly Pinatik menjelaskan tentang fungsi dan tugas dari SAMSAT Amurang, Pada tabel 2.3 dijelaskan secara ringkas yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Penelitian ini berfokus pada tugas dan fungsi Samsat.

TABEL 2.3 Rujukan Penelitian Untuk Samsat

Judul	ANALISIS PENDIDIKAN, PENGALAMAN KERJA DAN PELATIHAN PADA PELAYANAN APARATUR PAJAK DI UPTD SAMSAT AMURANG
Nama Peneliti	Ryan T. Regah , Harijanto Sabjino , Sherly Pinatik
Metode Penelitian	Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif.
Teknis Pengumpulan Data	Dengan mencatat semua data secara objektif dan apa adanya sesuai dengan proses wawancara yang dilakukan.
Teknis Analisis Data	Dengan menganalisis data-data yang didapat melalui wawancara dan dokumentasi di tempat penelitian.
Hasil Penelitian	kontribusi pendapatan dari pajak kendaraan bermotor yang paling besar diantara pajak-pajak yang lain sehingga pelayanan dilakukan dengan Prima maka pelayanan pajak kendaraan bermotor yang prima diseluruh kantor SAMSAT Amurang harusnya menjadi prioritas utama bagi pemerintah dalam mendorong peningkatan kualitas layanan bagi masyarakat dan telah

	dilaksanakan dengan baik.
Hubungan dengan peneliti yang sekarang	Berdasarkan penelitian terdahulu pelayanan Samsat telah dilakukan dengan baik tetapi dalam kenyataannya di lapangan masyarakat belum merasakan dampak dari pembayaran pajak yang dibayarkan oleh masyarakat sendiri seperti halnya pajak Program Parkir Berlangganan yang pada kenyataannya masyarakat masih membayar retribusi parkir.

Sumber : Jurnal Yang Di Publikasikan Tahun 2019

4. Rujukan Jurnal Hendrawan Toni Taruno (2017)

Keempat, “EVALUASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN PARKIR Studi Kasus: Kota Semarang” Penelitian yang dilakukan oleh Hendrawan Toni Taruno menjelaskan tentang. Pengelolaan parkir di Semarang adalah lemahnya implementasi Regional Pengaturan retribusi parkir Pada tabel 2.4 dijelaskan secara ringkas yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Penelitian ini berfokus pada pengelolaan parkir.

TABEL 2.4 Rujukan Penelitian Untuk Pengelolaan Parkir

Judul	EVALUASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN PARKIR Studi Kasus: Kota Semarang
Nama Peneliti	Hendrawan Toni Taruno
Metode Penelitian	Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif.
Teknis Pengumpulan Data	Dengan menggunakan data sekunder yang didapatkan dari PATTIRO Kota Semarang.

Teknis Analisis Data	Dengan membandingkan jumlah pendapatan retribusi parkir antara target yang ditetapkan dengan realisasi yang didapatkan
Hasil Penelitian	Secara umum, kondisi pengelolaan parkir di Kota Semarang masih tergolong buruk. Hal ini ditandai dengan buruknya pelayanan parkir yang diberikan dan rendahnya target penerimaan retribusi parkir setiap tahunnya.
Hubungan dengan peneliti yang sekarang	Berdasarkan penelitian terdahulu implementasi parkir yang buruk merupakan faktor pemicu munculnya berbagai masalah diantaranya kurangnya kepercayaan masyarakat

Sumber : Jurnal Yang Di Publikasikan Tahun 2017

5. Rujukan Jurnal Dina Rande (2017)

Kelima, “PENGARUH KOMPETENSI TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MAMUJU UTARA” Penelitian yang dilakukan oleh Dina Rande menjelaskan tentang kinerja Pegawai Dinas Perhubungan dan akan di jelaskan secara rinci pada tabel 2.5 dengan berfokus pada Kinerja Pegawai

TABEL 2.5 Rujukan Penelitian Untuk Dinas Perhubungan

Judul	PENGARUH KOMPETENSI TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN
-------	---

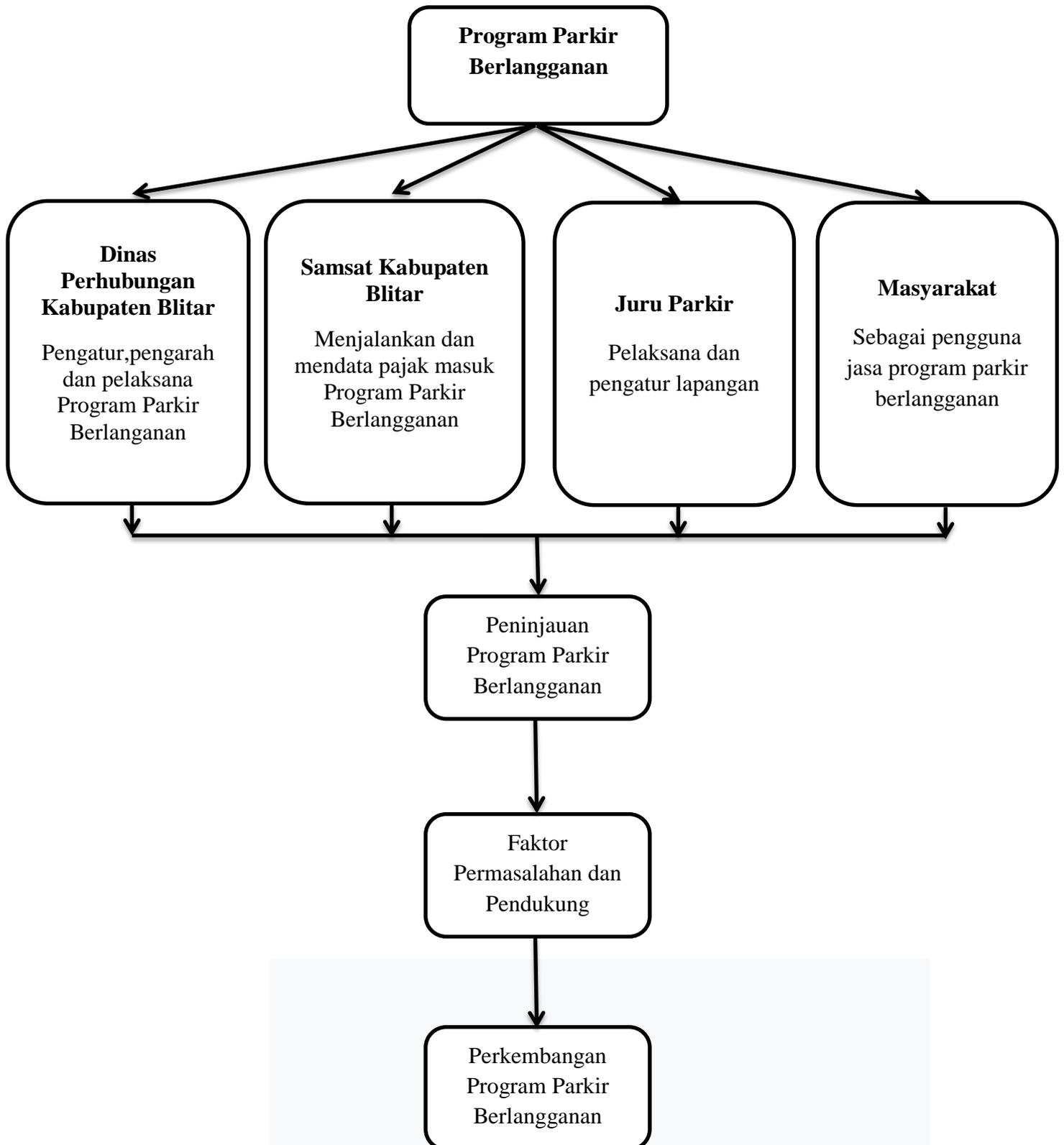
	INFORMATIKA KABUPATEN MAMUJU UTARA
Nama Pengarang	Dina Rande
Metode Penelitian	Pendekatan penelitian ini adalah deskriptif dan kuantitatif
Teknis Pengumpulan Data	Dengan observasi dan wawancara
Teknis Analisis Data	Analisis Statistik Deskriptif dan analisis data kuantitatif
Hasil Penelitian	Dinas Perhubungan Kabupaten Mamuju Utara harus lebih memperhatikan masalah kompetensi pegawai, terutama yang berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan.
Hubungan dengan peneliti yang sekarang	Hubungan peneliti terdahulu ialah kinerja pegawai harus diperhatikan yang berkaitan dengan kompensasi serta pengetahuan dan keterampilan pegawainya, seperti halnya keterampilan pegawai juru parkir Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar yang harus di tingkatkan.

Sumber : Jurnal Yang Di Publikasikan Tahun 2017

2.5 Kerangka Pikiran

Penelitian ini mengangkat tentang Program Parkir Berlangganan yang diselenggarakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar, dalam permasalahannya peneliti tertarik untuk meneliti peran Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar dalam melaksanakan program tersebut. Untuk mempermudah melihat langkah yang dilakukan dalam melakukan penelitian ini maka peneliti membuat alur atau konsep penelitian sebagai berikut agar mudah dipahami dan dimengerti.

Gambar 2.4. Kerangka Berfikir



Sumber: Dikembangkan Untuk Penelitian Ini, 2021

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

3.1.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, karena penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar dalam melaksanakan program parkir berlandaskan. Pendekatan kualitatif menurut Komariah (2009:2) adalah “pendekatan yang di dalamnya terdapat usulan penelitian, proses, hipotesis, turun lapangan, analisis data sampai dengan penulisan mempergunakan aspek-aspek non perhitungan numerik story”. Menurut Bogdan dan Biklen yang dikutip oleh Rahmat (2012:3) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah “salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku peserta yang diamati yang diharapkan mampu menghasilkan uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan dan perilaku yang diamati”. Data laporan berupa hasil wawancara dengan beberapa narasumber dan penelitian langsung di lapangan serta dokumen-dokumen yang ada.

Sedangkan menurut Moleong (2016:6) berpendapat bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian dengan memahami suatu fenomena tentang apa yang sedang dialami oleh peneliti dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus (alamiah). Proses pendeskripsian juga menggunakan berbagai metode alamiah. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk memaparkan dan menganalisis secara jelas dan terperinci terhadap suatu fenomena, peristiwa, kegiatan sosial, sikap, kepercayaan dan perspektif serta pemikiran seseorang baik secara individu maupun kelompok (Sugiyono, 2016:60).

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pendekatan kualitatif adalah proses yang dilakukan oleh peneliti mulai dari perencanaan penelitian hingga turun ke lapangan dengan melakukan wawancara terbuka untuk menelaah dan memahami sikap, pandangan, perasaan dan perilaku serta menggunakan

penulisan non perhitungan. Penelitian kualitatif menghasilkan data berupa ucapan atau tulisan dan perilaku terhadap apa yang diamati. Hasil data yang diperoleh diolah dan dianalisis serta dituangkan dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada konteks alamiah serta menggunakan metode yang alamiah pula.

3.1.2 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi kasus. Studi kasus menurut Yin (2002:1) adalah salah satu metode pendekatan pada penelitian ilmu-ilmu sosial dan lebih sesuai apabila pokok suatu penelitian berkenaan dengan bagaimana dan mengapa. Studi kasus digunakan apabila peneliti hanya memiliki peluang yang sedikit untuk mengendalikan suatu peristiwa yang sedang diselidiki. Fokus penelitian studi kasus terletak pada peristiwa masa kini yang terjadi di dalam kehidupan nyata.

Selain itu Ulfatin (2017:25) menjelaskan bahwa penelitian dengan pendekatan studi kasus adalah metode penelitian yang memusatkan perhatian pada suatu kasus secara intensif dan rinci. Studi kasus dalam penelitian kualitatif umumnya bertujuan untuk mempertahankan keutuhan dari objek yang diteliti. Jenis penelitian studi kasus digunakan untuk menggali dan memperoleh informasi atau data-data lebih mendalam guna mengetahui atau mengkaji mengenai pelaksanaan program parkir berlangganan di Wilayah Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar.

Berdasarkan pengertian diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa studi kasus merupakan jenis penelitian yang difokuskan pada peristiwa-peristiwa dalam kehidupan nyata. Jenis penelitian studi kasus dilakukan secara teratur, mendalam, jelas atau terperinci dan komprehensif. Peristiwa atau kasus yang terjadi dapat berupa penyimpangan yang bersifat negatif dan bersifat kearah pembangunan atau positif. Penelitian terhadap bagaimana peran Dinas Perhubungan dalam melaksanakan program parkir berlangganan di wilayah Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar mengambil peristiwa atau kasus tentang pembangunan yang bersifat kearah yang positif.

3.2 Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti dalam penelitian kualitatif sangatlah penting. Peneliti merupakan pengumpul data utama, maka hanya manusia yang mampu memahami kenyataan-kenyataan yang terjadi dalam lapangan (Moleong, 2016:09). Sehubungan dengan ini, peneliti memiliki peran yang sangat penting dalam proses pengumpulan data di lapangan dan mengikuti kegiatan secara menyeluruh yang ingin diteliti. Peneliti memiliki kedudukan yang rumit dalam penelitian kualitatif. Peneliti sekaligus merupakan perencana, pelaksana, pengumpul data, analisis, penafsiran data dan menjadi pelapor penelitian (Moleong, 2016:168). Instrumen selain manusia (alat-alat) memiliki fungsi yang terbatas, hanya sebagai pendukung instrument utama dalam penelitian (Ulfatin, 2017:158).

Dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai instrument utama dalam proses penelitian. Kehadiran peneliti di lokasi penelitian terdiri dari tiga tahap yaitu pertama, penelitian pendahuluan dilakukan dengan observasi dan menggali informasi awal terkait gambaran umum tentang program parkir berlangganan. Kedua, penelitian di lapangan dilakukan dengan mencari dan mengumpulkan data utama dalam penelitian yang didapat dari informan kunci (key informan) dan informan tambahan seperti Kepala Bidang Lalu-Lintas, juru parkir Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar wilayah Kecamatan Wlingi dan masyarakat Kecamatan Wlingi Pada umumnya. Ketiga, penelitian terakhir yaitu penelitian yang dilakukan untuk melengkapi data utama yang dirasa belum cukup dan lengkap.

Berdasarkan pengertian diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa kehadiran peneliti sangatlah penting dalam sebuah penelitian. Peneliti yang mampu memahami peristiwa-peristiwa yang terjadi di lapangan. Pada saat observasi awal, peneliti memberikan surat izin dari Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Unimar AMNI Semarang, yang diberikan kepada pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar dan Samsat Kabupaten Blitar. Setelah diizinkan oleh pihak yang bersangkutan, peneliti melakukan wawancara kepada Kepala Bidang Lalu-Lintas, Kasi perparkiran dan pegawai Samsat

Selain wawancara peneliti juga melakukan pengamatan atau observasi langsung dan dokumentasi.

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian harus menggambarkan lokasi penelitian (keunikan) dan disertai alasan mengapa memilih lokasi tersebut untuk dijadikan tempat penelitian (Ulfatin, 2017:157). Lokasi penelitian ini terletak di Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar karena latar belakang wilayah yang memiliki pusat sektor perekonomian yang ramai. Seharusnya dengan sektor perekonomian yang ramai, Program parkir berlangganan dapat dimaksimalkan kinerjanya dikarenakan Kecamatan Wlingi memiliki potensi-potensi tempat yang bagus dan ramai. Dengan penelitian ini diharapkan dapat mengetahui peran Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar dalam meningkatkan program tersebut.

3.4 Sumber Data

Penelitian dilakukan dengan menggunakan penelitian kualitatif, maka peneliti memakai sumber data penelitian ini yang dipaparkan sebagai berikut.

1. Informan

Penelitian kualitatif tidak menggunakan konsep populasi dan sampel. Sumber informasi untuk penelitian kualitatif adalah informan atau narasumber yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti dan oleh peneliti dianggap mampu memberikan informasi (Sugiyono, 2016:62). Penelitian ini memilih informan sebagai berikut:

- a) Pegawai kantor Dinas perhubungan Kabupaten Blitar selaku Kasi Perparkiran Bpk. Yudi Setiawan,S.E.,M.M sebagai penanggung jawab dan pelaksana program parkir berlangganan serta 2 Staf kerja yang melakukan monitoring di wilayah kerja Dinas Perhubungan kabupaten Blitar.
- b) 2 Pegawai Samsat Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar selaku pengurus pajak program parkir berlangganan yang berkordinasi dengan pihak Dinas Perhubungan

- c) Juru Parkir Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar khususnya wilayah Kecamatan Wlingi sebagai pelaksana lapangan yang berada dalam wilayah penelitian yang di lakukan.
- d) Masyarakat Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar sebagai orang yang merasakan dampak dan melakukan kegiatan parkir khususnya di wilayah kecamatan wlingi yang merasakan bagaimana program parkir berlangganan di jalankan.

Alasan memilih Yudi Setiawan,S.E.,M.M. sebagai sumber informasi utama karena Kasi perparkiran merupakan objek pertama dalam penelitian ini karena selaku penanggung jawab program parkir berlangganan, sedangkan untuk juru parkir Kecamatan Wlingi dipilih karena merupakan petugas yang mengatur parkir di wilayah penelitian berlangsung dan masyarakat Kecamatan Wlingi sebagai obyek yang menerima dampak dan merasakan jasa dari sistim program parkir berlangganan.

2. Peristiwa

Peristiwa menurut Patilima (2013:26) merupakan “rangkaian dari sejarah atau kejadian dalam kehidupan yang tersusun secara berurutan”. Serangkaian kejadian yang menjadi fokus utama adalah peran Dinas Perhubungan dalam meningkatkan program parkir berlangganan.

3. Dokumen

Dokumen menurut Sugiyono (2016:329) adalah “catatan peristiwa yang sudah berlalu”. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Dokumen Surat Perjanjian Kerja Harian Nomor : 800/ /409.107.2/ 2020 Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar, daftar nama dan tempat juru parkir Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar, daftar gaji juru parkir Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar, untuk mengetahui pokok permasalahan yang dibahas dalam program parkir berlangganan guna untuk mengetahui sejauh mana terlaksananya program parkir berlangganan.

3.5 Proses Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelitian data secara langsung, dimana peneliti langsung mendatangi obyek yang akan diteliti. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan beberapa teknik yang dianggap relevan dan akurat dalam pengambilan data. Teknik-teknik pengumpulan data adalah sebagai berikut;

1. Wawancara

Wawancara menurut Moleong (2016:186) merupakan kegiatan tanya jawab yang dilakukan antara dua pihak yaitu pihak pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Sebelum melakukan wawancara perlu adanya daftar pertanyaan yang harus disusun terlebih dahulu.. Terdapat beberapa hal yang perlu dipegang oleh peneliti ketika menggunakan metode wawancara adalah sebagai berikut.

- a) Subyek merupakan orang yang paling tahu.
- b) Pernyataan subyek benar dan dapat dipercaya.
- c) Interpretasi subyek tentang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peneliti kepadanya adalah sama dengan apa yang dimaksudkan oleh peneliti (Hadi yang dikutip oleh Sugiyono, 2016:194).

Terdapat 4 informan yang diwawancarai, yakni Kasi perparkiran Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar, pegawai Samsat Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar, juru parkir Kecamatan Wlingi dan masyarakat Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar. Teknik wawancara dalam penelitian ini menggunakan semi terstruktur. Teknik wawancara semi terstruktur menurut Edi (2016:19) peneliti dapat menggali informasi lebih mendalam karena dilakukan lebih fleksibel sehingga membuat informan lebih nyaman dan terbuka dalam memberikan keterangan. Dengan menggunakan teknik wawancara semi terstruktur, peneliti dapat mengajukan pertanyaan struktur dengan ditambah pertanyaan tambahan agar informasi dapat diperoleh lebih mendalam, yang berarti bahwa

peneliti dapat mengajukan pertanyaan secara bebas dari urutan manapun serta dapat menambah pertanyaan sesuai jawaban dari informan.

2. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang mempunyai karakteristik lebih spesifik apabila dibandingkan dengan teknik yang lain. Wawancara selalu berkomunikasi dengan orang, maka observasi tidak hanya terbatas pada orang tetapi obyek-obyek alam lain juga. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan apabila penelitian berkenaan dengan tingkah laku manusia, proses kerja dan gejala-gejala alam (Sugiyono, 2016:203). Hal ini sesuai dengan judul penelitian yang diteliti yaitu peran Dinas Perhubungan. Pengamatan bisa dilakukan mulai dari yang sangat terstruktur hingga yang paling kabur tentang kejadian dan tingkah laku. Terdapat beberapa jenis observasi dalam pelaksanaan pengumpulan data. Menurut Sugiyono (2016:204) observasi dapat dibedakan menjadi *participant observation* (observasi berperan serta) dan *non participant observation*, selanjutnya dari segi instrumen yang digunakan, maka observasi dapat dibedakan menjadi observasi terstruktur dan tidak terstruktur.

Penelitian ini menggunakan observasi non partisipan, dalam melakukan observasi, peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat independen. Peneliti mencatat, menganalisis dan selanjutnya dapat membuat kesimpulan tentang perilaku yang bersangkutan. Kegiatan yang diamati oleh peneliti yakni kegiatan pungutan retribusi parkir liar dan perilaku juru parkir Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar.

3. Dokumentasi

Dokumentasi menurut Sugiyono (2016:329) merupakan catatan yang sudah berlalu, yang dapat berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumentasi yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, ceritera, biografi, peraturan dan kebijakan. Dokumentasi yang berbentuk gambar dapat berupa foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumentasi yang berbentuk tulisan

dalam penelitian ini yakni visi misi Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar, struktur Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar,. Sedangkan dokumentasi dalam bentuk gambar misalnya foto wawancara terhadap juru parkir, foto saat wawancara kepada pegawai Samsat, foto wawancara terhadap Kasi Perparkiran dan foto-foto yang berkaitan dengan penelitian. Foto yang digunakan dalam penelitian ini adalah foto yang dapat mendukung peran Dinas Perhubungan Dalam Melaksanakan program parkir berlangganan.

3.6 Prosedur Analisis Data

Menurut Bogdan dalam Sugiyono (2017:334) analisis data adalah proses merekonstruksi data yang telah didapat melalui hasil wawancara, observasi, dan yang lain secara sistematis, sehingga dapat dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah hasil dari wawancara dan pengamatan langsung di lapangan, dan dokumentasi yang kemudian akan dijabarkan dalam bentuk deskriptif. Proses analisis data dilakukan sebelum, saat, dan setelah di lapangan. Teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan model interaksi. Analisis data menurut Miles dan Huberman di kutip oleh Sugiono (2016) memiliki empat tahap yaitu: 1) pengumpulan data; 2) reduksi; 3) penyajian data; dan 4) penarikan kesimpulan. Tahap-tahap tersebut diuraikan sebagai berikut.

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam hal ini berupa data yang dikumpulkan sebelum, saat, dan sesudah penelitian seperti:

- a) Wawancara, wawancara digunakan peneliti untuk mencari hal-hal dari informan secara mendalam. Wawancara dilakukan dengan proses tanya jawab melalui pedoman wawancara yang telah disusun untuk mendapatkan jawaban guna menyelesaikan masalah penelitian. Data yang diperoleh dari hasil wawancara kemudian diolah semenarik mungkin melalui gagasan-gagasan untuk menemukan jawaban dari masalah penelitian sehingga

menjadi hasil wawancara. Adapun informan yang dijadikan sumber data dalam penelitian ini yaitu kasi parkir dan staf karyawan, petugas SAMSAT, jukir dan masyarakat Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar.

- b) Observasi, observasi dilakukan melalui pengamatan langsung di lapangan terhadap obyek dan subyek penelitian baik melihat maupun mendengar. Observasi dilakukan di wilayah pasar Wlingi dan taman terbuka hijau Kecamatan Wlingi dan beberapa tempat yang ramai yang terdapat di wilayah Kecamatan Wlingi. Catatan hasil observasi merupakan hasil kegiatan observasi yang telah dilakukan selama penelitian.
- c) Dokumentasi, dokumentasi merupakan salah satu sarana pembantu untuk bisa mengumpulkan data. Dokumentasi yang dilakukan berupa data dokumen Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar, yakni 1) Dokumen profil Dishub; 2) Dokumen perjanjian kerja juru parkir dan pembagian tempat kerja; dan (3) Foto yang berkaitan dengan penelitian; serta (4) Vidio yang berkaitan dengan penelitian. Dari pengumpulan dokumen tersebut dibuat catatan hasil dokumentasi yang diperoleh dari dokumen resmi Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar.

2. Reduksi

Setelah pengumpulan data, selanjutnya proses reduksi. Reduksi adalah proses seleksi data, data dari pengumpulan data dipilih sesuai dengan rumusan masalah. Dalam mereduksi data yang di peroleh dalam pengamatan di lapangan akan disesuaikan dengan dokumen yang didapat dari pelaksana dan penanggung jawab program parkir berlangganan (Dinas Perhubungan Kasi Perparkiran) sesuai dengan apa yang telah dilakukan. Dari data yang telah dikumpulkan dari proses pengumpulan data di lapangan penelitian selanjutnya memilah-milah data sesuai dengan fokus yang diperlukan. Dengan demikian data yang telah direduksi memberi gambaran yang jelas sehingga bisa menjawab rumusan masalah dan bisa mencapai tujuan penelitian.

3. Penyajian Data

Setelah reduksi data, langkah selanjutnya yaitu penyajian data. Data disajikan satu per satu sesuai dengan rumusan masalah. Data yang telah diperoleh diuraikan hasil temuannya yang diperoleh dari pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi dalam bentuk teks yang bersifat naratif. Data dapat disajikan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Penyajian data digunakan untuk memudahkan memahami data yang ditemukan di lapangan saat penelitian.

4. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan langkah terakhir dalam analisis data. Penarikan kesimpulan dilakukan menggunakan deskriptif yaitu penelitian yang mendeskripsikan atau menggambarkan data yang terkumpul dalam bentuk paparan data dan temuan penelitian. Penarikan kesimpulan ditarik dari paparan data, simpulan disebut temuan penelitian yang sesuai dengan rumusan masalah.

3.7 Pengecekan Keabsahan Data

Setelah data dianalisis, langkah selanjutnya peneliti akan melakukan pemeriksaan keabsahan data. Untuk mengecek keabsahan data, diperlukan adanya teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan pada empat kriteria yaitu derajat kepercayaan, keteralihan, kebergantungan dan kepastian (Moleong, 2016:329-331). Penelitian dapat dikatakan valid apabila diuji keabsahan datanya. Dalam penelitian ini uji keabsahan data dilakukan melalui beberapa teknik, diantaranya sebagai berikut.

1. Ketekunan atau Keajegan Pengamatan

Ketekunan pengamatan berarti konsisten dalam melakukan pengamatan. Ketekunan pengamatan bertujuan untuk menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan isu atau persoalan yang sedang diamati. Ketekunan dilakukan secara berkesinambungan, terhadap faktor-faktor yang menonjol terkait dengan peran Dinas Perhubungan dalam melaksanakan program parkir berlangganan di wilayah Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar.

2. Triangulasi

Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan data dengan memanfaatkan sesuatu diluar data tersebut. Triangulasi digunakan untuk membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu data. Penelitian ini akan menggunakan teknik triangulasi dengan sumber, menurut Denzin (1978) membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan sumber *metode, penyidik* dan *teori* teori dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek titik balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif (Paton 1987:331) yang dikutip oleh Moleong (2016) triangulasi dengan sumber yaitu dapat dilakukan dengan (1) membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara; (2) membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi; (3) membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu; (4) membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan; (5) membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

3.8 Tahap-Tahap Penelitian

Suatu penelitian dilakukan dengan beberapa tahap. Tahap pertama mencari sesuatu yang perlu diketahui atau dinamakan dengan tahap orientasi fokus, pada tahap ini pengumpulan data dilaksanakan. Tahap kedua yaitu tahap pengecekan dan pemeriksaan keabsahan data (Moleong, (2011:143). Tahap-tahap penelitian dipaparkan sebagai berikut.

1. Tahap pra lapangan

a) Tahap Penyusunan Proposal

Pada tahap persiapan atau pra lapangan, tahap pertama yang dilakukan oleh peneliti yaitu menyusun proposal. Penyusunan proposal penelitian meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian,

kegunaan penelitian, kajian teori dan metode yang digunakan dalam penelitian. Proposal penelitian juga diuji oleh pembimbing dan mendapatkan perbaikan.

b) Tahap Pengurusan Surat Izin

Tahap persiapan selanjutnya yang dilakukan oleh peneliti yakni mengurus surat perizinan. Peneliti mengurus surat izin ke Fakultas Ilmu Sosial agar mendapatkan izin penelitian dari dekan. Setelah peneliti mendapatkan surat izin dari dekan, maka surat tersebut diberikan kepada Dinas Perhubungan dan kantor Samsat Kabupaten Blitar.

c) Tahap Penyusunan Instrumen Penelitian

Sebelum terjun ke lapangan, peneliti menyusun instrument penelitian terlebih dahulu agar penelitian berjalan dengan lancar dan terstruktur. Penyusunan instrument penelitian berupa daftar pertanyaan kepada informan.

2. Tahap lapangan

a) Tahap Memasuki Lapangan

Pada tahap lapangan, pertama-tama peneliti memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada pihak terkait. Setelah memperkenalkan diri, peneliti memberikan surat izin dari Unimar AMNI Semarang kepada pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar dan Samsat Kabupaten Blitar serta dilanjut dengan menyampaikan tujuan dan maksud kedatangan peneliti.

b) Tahap Pengumpulan Data

Pada tahap ini peneliti melakukan pengumpulan data dengan teknik observasi/pengamatan terhadap obyek penelitian atau peristiwa yang terjadi, wawancara dengan informan dan mengumpulkan dokumen maupun data-data yang berkaitan dengan penelitian.

c) Tahap Analisis Data

Setelah data terkumpul dari sumber data berupa wawancara, observasi dan dokumen, peneliti melakukan analisis data yang telah terkumpul dengan memilah jawaban dari informan kunci, pendukung

dan utama dengan mencocokkan hasil jawaban dan membandingkan. Apabila terjadi sebuah ketidak suaian akan digali lebih mendalam sampai menemukan titik jenuh dari semua informan yang bersangkutan. Hasil analisis diuraikan ke dalam paparan data dan temuan penelitian.

3. Tahap pelaporan

Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah penyusunan laporan penelitian. Dalam penelitian ini, laporan disusun berupa skripsi sesuai dengan Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (PPKI) Unimar AMNI Semarang.

3.9 Narasumber dan Instrumen Wawancara

Tahap-tahap perancangan metode dalam melakukan pengambilan data di lapangan:

Penelitian dilakukan terhadap 4 informan berbeda dengan rincian yaitu 1 kasi parkir Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar dan 2 anggota Stafnya sebagai pengawas monitoring, 2 Petugas Samsat penarik pajak program parkir berlangganan, juru parkir Kecamatan Wlingi dan 50 masyarakat Kecamatan Wlingi.

Narasumber dan Instrumen Wawancara

1. Informan kunci 1 Kasi Parkir dan 2 petugas monitoring Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar.

- Mencari data juru parkir serta peraturan perjanjian kerja juru parkir?
- Menanyakan perihal program parkir berlangganan yang menjadi pertanyaan masyarakat, bagaimana dan mengapa ?
- Menanyakan perihal pemilihan seleksi juru parkir? Apakah memang berkompeten dan dapat dipercaya dalam melaksanakan tugasnya?
- Mencari tahu jumlah anggota pegawai monitoring juru parkir tiap-tiap wilayah Kabupaten Blitar khususnya di Kecamatan Wlingi?
- Berapa kali Dinas Perhubungan (Kasi Perparkiran) melaksanakan rapat kerja bersama Juru Parkir?

- Seberapa sering Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar (Kasi Perparkiran) melaksanakan monitoring?
 - Apakah masyarakat sudah jelas dan paham tentang program parkir berlangganan?
2. Informan pendukung 2 petugas penarikan pajak retribusi parkir Samsat Kabupaten Blitar.
- Berapa pajak yang diwajibkan kepada masyarakat untuk program parkir berlangganan?
 - Dalam bentuk apa masyarakat mendapatkan bukti bahwa telah membayar pajak program parkir berlangganan dan apakah sudah efisien dan dapat dimengerti oleh masyarakat?
 - Bagaimana petugas Samsat mensosialisasikan program parkir berlangganan kepada masyarakat pada saat membayar, apakah mereka dapat mengerti dan paham?
3. Informan pendukung 10 juru parkir Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar Khususnya di Wlingi.
- Apakah mengerti tentang masalah yang menjadi pertanyaan masyarakat tentang parkir?
 - Apakah tahu dan mengerti tentang tugas pokok serta aturan kerja yang di tetapkan?
 - Apakah mengerti tentang sanksi yang diterima apabila melanggar aturan perjanjian kerja yang telah di tetapkan?
 - Apakah Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar (Kasi Perparkiran) giat melaksanakan monitoring?
 - Berapa kali Dinas Perhubungan (Kasi Perparkiran) melaksanakan rapat kerja bersama Juru Parkir?
 - Apakah masih menarik tarif retribusi parkir terhadap masyarakat?
 - Bagaimana kendala dalam menjalankan tugas sebagai seorang Jukir?
4. Informan utama masyarakat Wilayah Kecamatan Wlingi.

Untuk mendapatkan data yang valid wawancara dilakukan dengan metode pengambilan menggunakan kuesioner pertanyaan terbuka dengan

tujuan agar mendapatkan data yang diinginkan dan mencapai tujuan yang sama sampai semua dapat untuk mengukur derajat keeratan (korelasi) antara beberapa variabel baik yang sudah jelas secara literatur berhubungan atau sesuatu masalah yang akan diteliti. Untuk jumlah narasumber atau informan dari masyarakat Menurut Gay, Mills dan Airasian (2009: 133) untuk penelitian metode deskriptif, minimal 10% populasi, untuk populasi yang relatif kecil minimal 20%, sedangkan untuk penelitian korelasi diperlukan sampel sebesar 30 responden untuk mencapai tujuan yaitu untuk mengetahui Peran Dinas Perhubungan dalam melaksanakan program parkir berlangganan peneliti mengambil sampel 50 orang masyarakat Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar.

3.10 Rekap Korelasi

untuk mengukur derajat keeratan (korelasi) antara beberapa variabel baik yang sudah jelas secara literatur berhubungan atau sesuatu masalah yang akan diteliti. dapat ditarik kesimpulan dalam menyusun instrumen wawancara peneliti menanyakan berberapa pertanyaan yang sama terhadap informan agar mendapat data yang akurat tentang Peran Dinas Perhubungan sudah baik atau belum, jadi untuk rekap korelasinya agar mendapat kesamaan jawaban yang valid peneliti menanyakan pertanyaan yang sama terhadap beberapa narasumber yaitu dengan pertanyaan sebagai berikut:

1. Berapa kali Dinas Perhubungan melakukan Sosialisasi kepada masyarakat?
2. Apakah masyarakat sudah paham dan mengerti tentang program parkir berlangganan?
3. Apakah masyarakat masih di tarik tarif retribusi parkir oleh juru parkir?
4. Apakah bukti pembayaran pajak program parkir berlangganan sudah efisien?

Dengan menanyakan permasalahan yang sama diharapkan dapat mencari kesimpulan yang ada dalam permasalahan. Dengan menanyakan pertanyaan yang sama bertujuan agar dapat membandingkan jawaban dari beberapa narasumber yang dimaksud dan dapat ditarik kesimpulan tentang

jawaban yang didapat tujuan utama peneliti adalah dengan menanyai narasumber sampai ke titik jenuh dimana jawaban dari narasumber harus bisa di pertanggung jawabkan.

3.11 Data Juru Parkir Dan Tempat Kerja

Dalam melaksanakan program parkir berlangganan diperlukan adanya dukungan dari berbagai pihak terkait diantaranya adalah juru parkir. Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar memiliki setidaknya 96 juru parkir yang tersebar diberbagai wilayah kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar tidak terkecuali di wilayah Kecamatan Wlingi yang terdapat 25 juru parkir resmi yang berada di berbagai titik pertokoan dan tempat perbelanjaan, berikut adalah data juru parkir di wilayah Kabupaten Blitar dan tempat kerjanya.

Tabel 3.1

Data Juru Parkir Dan Tempat Kerja

NO	NAMA	LOKASI
1	LASIDI WIDODO	Depan Pasar Lorejo.
2	TEGUH JATMIKO	Depan Toko Apollo Lodoyo.
3	SUMARSIH	Depan Toko Podo Seneng Lodoyo.
4	AGUS SUSANTO	Halaman Terminal Lodoyo.
5	RENI KURNIASARI	Depan Toko Sinar Lodoyo.
6	ANANG SUBAGYO	Depan Pasar Panggungrejo.
7	BONAJI	Depan BRI Panggungrejo.
8	FERI PRASETIYO	Depan Pasar Lorejo.
9	YUSUF ARIFIN	Depan Pasar Suruhwadang.
10	MOCHAMAD RIDWAN	Depan Pasar Maron.
11	RAKHMAD MA'ARUF	Halaman Terminal Kademangan.
12	TRİYONO	Jln. Barat Kel. Kalipang Kec. Sutojayan.
13	EDI PRAYITNO	Depan BRI Suruhwadang.
14	KARIYANTO	Jl. Sentiaki Timur Pasar Kademangan.

NO	NAMA	LOKASI
15	AGUNG SETYA T.	Jl. Sentiaki Timur Pasar Kademangan.
16	DJAMIN	Jl. Sentiaki Timur Pasar Kademangan.
17	AJIS ASROLI	Jl. Sentiaki Timur Pasar Kademangan.
18	ARIFIN	Jl. Sentiaki Timur Pasar Kademangan.
19	BADHI PRAYOGO	Jl. Trisula Barat Pasar Kademangan.
20	SUWARNO	Jl. Sentiaki Timur Pasar Kademangan.
21	FARID NUR CHOLIS	Depan Warung Pojok Bu Patmi Kademangan.
22	PARLI DIDIK S.	Timur Pasar Penataran.
23	SUGIMAN	Selatan Pasar Penataran.
24	PURWANTO	Timur Pasar Penataran.
25	UNTUNG SRI AGUS. G.W	Timur Pasar Penataran.
26	MUJIONO ARIFIN	Depan Pasar Nglegok.
27	MUJI TRIYONO	Depan BRI Nglegok.
28	HARIYADI	Depan Warung Hidayah Kec. Nglegok.
29	IPUNG YUSWANTO	Timur Pasar Penataran.
30	HENGKI WISNU. R	Jln. Barat Kel. Kalipang Kec. Sutojayan.
31	SUPANI	Depan Apotek Cakra Srengat.
32	WAHYUDI EKO. H	Jalan Raya Dandong Kec. Srengat.
33	QOYYUM HASANI	Depan Pasar Wonodadi Kec. Wonodadi.
34	ANANG SUSILO	Depan BRI Srengat.
35	SENTOT RIWANTO	Jln. Raya Dandong Kec. Srengat.
36	PURWANTO	Depan Pasar Cangkring Kec. Ponggok.
37	SRI WINARTI	Selatan Pasar Cangkring Kec. Ponggok.
38	EDY SUNARKO	Jln. Raya Dandong Kec. Srengat.
39	SUKIRNO	Depan BRI Patok Kec. Ponggok.
40	HARMADI	Depan Mie Solo Kec. Srengat.
41	WIDODO	Jl. Urip Sumoharjo Wlingi .

NO	NAMA	LOKASI
42	NANANG ARIANTO	Depan BRI Unit Gaprang Kec. Kanigoro.
43	SUSILAWATI	Depan Pasar Kanigoro.
44	JARI WIONO	Depan Bank Jatim Kesamben
45	MALIKI	Depan BRI Kanigoro.
46	TEGUH SANTOSO	Halaman Samsat Kanigoro .
47	HERI SETIAWAN	Depan Pasar Kutukan Kec. Garum.
48	JEMARI	Depan Pasar Garum.
49	SUTIKNO	Depan Warung Uceng Bence Garum.
50	AGUS SUNYONO	Depan Pasar Kutukan Kec. Garum.
51	SUPIYANTO	Depan Pasar Kanigoro.
52	BAGUS WIROTOMO	Depan Toko Sederhana Utara Pasar Talun.
53	YUDI PRIYANTO	Depan Pasar Kutukan Kec. Garum.
54	SUROTO	Depan Warung Sate Mat Roji Kesamben.
55	MULKIHUL MUNIR	Depan Warung Bunda Sumbernanas.
56	ASAM ROTUL K.	Toko Liana Barat Pasar Kesamben.
57	SUROSO SUROJATI	Barat Pasar Kesamben.
58	MUHAMAD MORIS	Utara Pasar Kanigoro Kec. Kanigoro.
59	DEDY ARIFIN	Depan Kios Buah Kesamben.
60	SUNARYO	Jl. Urip Sumoharjo Kec. Wlingi .
61	BAMBANG IRAWAN	Jl. Urip Sumoharjo Wlingi.
62	ROCHMAD	Jl. Urip Sumoharjo Wlingi.
63	DODIK SETYAWAN	Depan Toko Eka Jaya Wlingi.
64	EKO WAHYUDI	Halaman Samsat Wlingi.
65	EKO YUDIONO	Depan Bakso Mie Solo Pandean Wlingi.
66	ANDRIYAS. S	Depan Warung Pecel Pandean Wlingi.
67	PUGUH JOKO. S	Halaman Samsat Kanigoro.
68	JUWITO	Halaman Pasar Desa Kesamben.
69	RAMELAN	Jln. Raya Dandong Kec. Srengat.
70	MUJIONO	Depan KUD Sumbernanas.

NO	NAMA	LOKASI
71	SUKATNO	Depan Bank BRI Unit Tangkil Wlingi.
72	HERMAN SETYAWAN	Depan Bank Mandiri .
73	SULISTIONO	Depan Pasar Kesamben Kec. Kesamben.
74	TOTOK SUWARTO	Halaman Samsat Wlingi.
75	SUHARNADI	Halaman Terminal Wlingi.
76	JUMARI	Halaman Terminal Wlingi.
77	TRİYONO	Depan Pasar Wlingi.
78	IMAM BUKORI	Depan Pasar Wlingi.
79	SUDARWITO	Jl. Bromo Utara Wlingi.
80	SUWUNG CAHYO C	Jl. Bromo Wlingi.
81	SUMARNI	Depan Pasar Wlingi.
82	HARI PURWO	Depan Toko Sriwijaya Wlingi.
83	SUBAGYO	Depan Toko Timur Wlingi.
84	SUBUR	Depan BRI Selopuro.
85	EKO SUPRIHATIN	Utara Pasar Wlingi.
86	AGUS MULYONO	Depan Bank Mandiri Wlingi.
87	SUNARDI	Halaman Terminal Wlingi.
88	RENGGA DWI P.	Halaman Terminal Wlingi.
89	MOCH. EKO. S	Depan Bank BPD Kademangan.
90	BAMBANG. S	Depan Warung KUD Kec. Kesamben.
91	DIKA WIDYANTO	Halaman Terminal Lodoyo Kec. Sutojayan.
92	HARIANTO	Halaman Terminal Wlingi Kec. Wlingi.
93	LANTUR SUHERMAN	Depan Pasar Wlingi Kec. Wlingi.
94	UCOK ATAIMI	Depan Pasar Cangkring Kec. Ponggok.
95	RONI	Depan TOKO VINA Lodoyo.
96	HENDRIK SUSANTO	Depan Pasar Gambar Wonodadi.

Sumber: Kasi Parkir Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar. Juni 2020

3.12 Teori Coding Pertanyaan Terbuka Responden

Dewa, et al, (2019) menyebut bahwa pertanyaan terbuka (*Open-Ended Question*) diperlukan untuk memperdalam pembahasan dan implikasi manajerial. Pemilihan subyek berdasarkan anggapan responden memiliki informasi yang relevan dengan studi ini. Langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Mempersiapkan dokumen utama yang terdiri atas instrumen wawancara yang telah dilakukan dengan responden.
- b. Melakukan pengkodean, yaitu memilih kode kata yang bermakna dan sesuai dengan tujuan penelitian,
- c. Melakukan pembahasan berdasarkan kesesuaian hasil Analisis Kuantitatif.

Setelah membuat instrument wawancara peneliti dapat membuat pengkodean dengan memilih kata yang bermakna dan sesuai dengan tujuan untuk mendapatkan data hasil wawancara yang lebih akurat untuk meneliti kontribusi atau “Peran Dinas Perhubungan Dalam Melaksanakan Program Parkir Berlangganan Di Wilayah Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar” dan dapat dijelaskan pada tabel berikut;

X1 = Kasi parkir dan staf kasi parkir

X2 = Petugas Samsat

X3 = Juru parkir

X4 = Masyarakat

Y = Peran Dinas Perhubungan

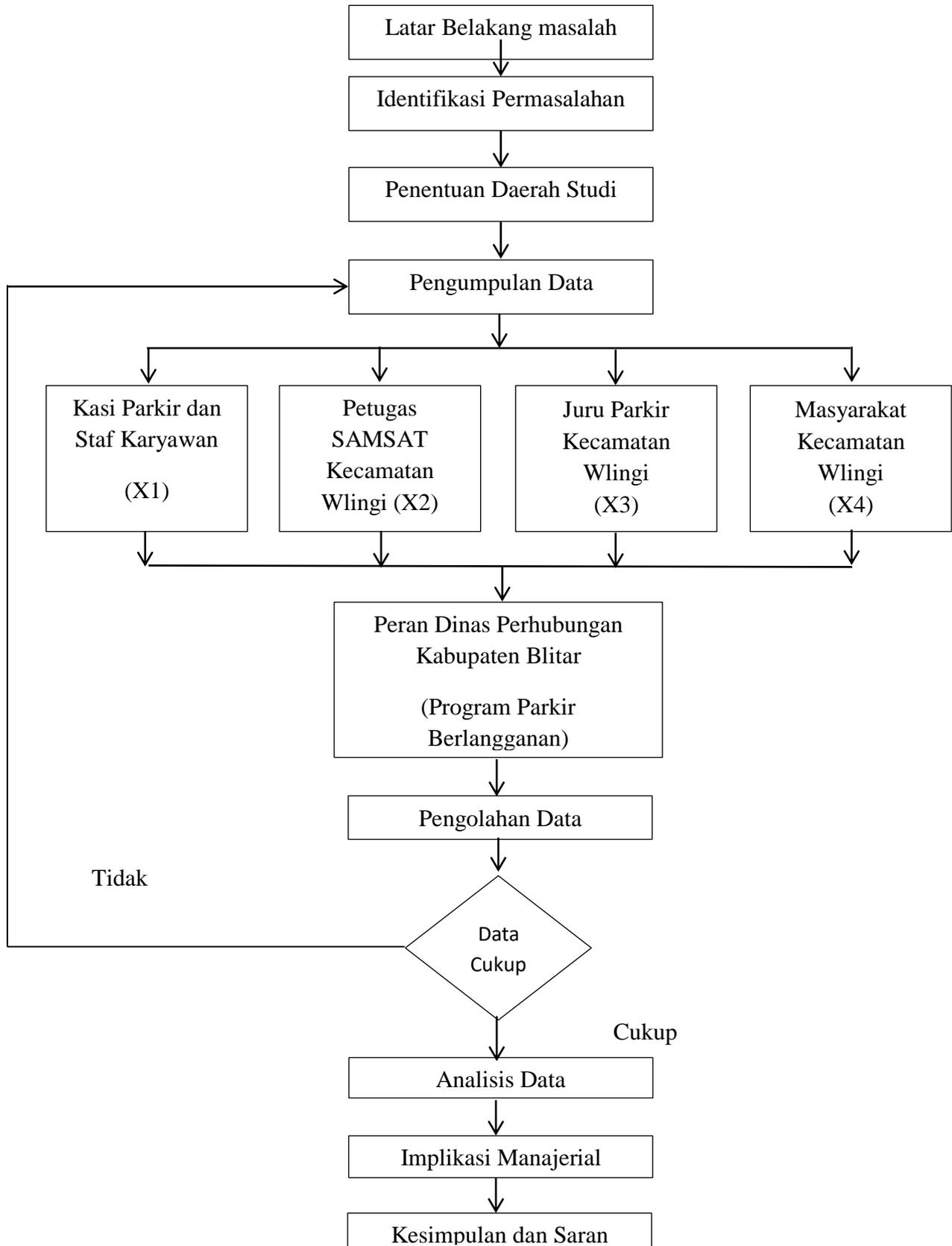
Jawaban Responden Pertanyaan Terbuka Setiap Variabel

Tabel 3.2 Jawaban responden

Variabel	Jawaban Responden	Skor
X1		
X2		
X3		
X4		
Y		

3.13 Diagram Alur Penelitian

Gambar 3.1 Diagram Alur Penelitian



BAB IV

PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN

4.1 Paparan Data

Paparan data membahas mengenai data penelitian yang diperoleh peneliti selama melaksanakan penelitian. Paparan data mengacu pada rumusan masalah yang telah disusun dengan menggunakan metode penelitian yang telah terpapar dalam penelitian ini. Paparan data bertujuan untuk mengetahui bagaimana kondisi suatu daerah yang telah menjadi objek penelitian sehingga mampu memudahkan peneliti dalam melaksanakan penelitian.

4.1.1 Gambaran Umum Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar

1) Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar

Visi Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar mengacu pada Visi dan Misi Bupati Kabupaten Blitar yaitu sebagai berikut:

Visi: Mewujudkan Kabupaten Blitar yang mandiri dan sejahtera berlandaskan akhlak mulia, baldatun, toyyibatun, warobun ghofur.

Misi:

- a. Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat Blitar berlandaskan iman dan takwa dengan kearifan lokal budaya
- b. Meningkatkan taraf hidup masyarakat Blitar yang memiliki mutu dan nilai kompetensi tinggi, dengan mengoptimalkan potensi generasi muda Kabupaten Blitar
- c. Pengoptimalan kinerja Pemerintah yang akuntabel, inovatif dan berintegritas
- d. Percepatan dan pemerataan pembangunan yang adil dan merata melalui pengembangan potensi ekonomi daerah dengan mengedepankan pemberdayaan masyarakat dan kelestarian lingkungan.

2) Keadaan Geografis

Berdasarkan data dari Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Pengairan, panjang jalan Nasional di Kabupaten Blitar adalah 44,765 KM yang dimulai dari perbatasan Kabupaten Malang – Perbatasan Kota Blitar dan perbatasan Kota Blitar – perbatasan Kabupaten Tulungagung. Panjang jalan provinsi adalah 28,78 KM, yang terbagi menjadi tiga bagian yaitu batas Kabupaten Kediri – Srengat sepanjang 8,164 KM, batas Kabupaten Tulungagung – Srengat 10,2 KM dan Srengat – Batas Kota Blitar 10,417 KM. Panjang jalan Kabupaten Blitar adalah 1.383,27 KM.

3) Sejarah Terbentuknya

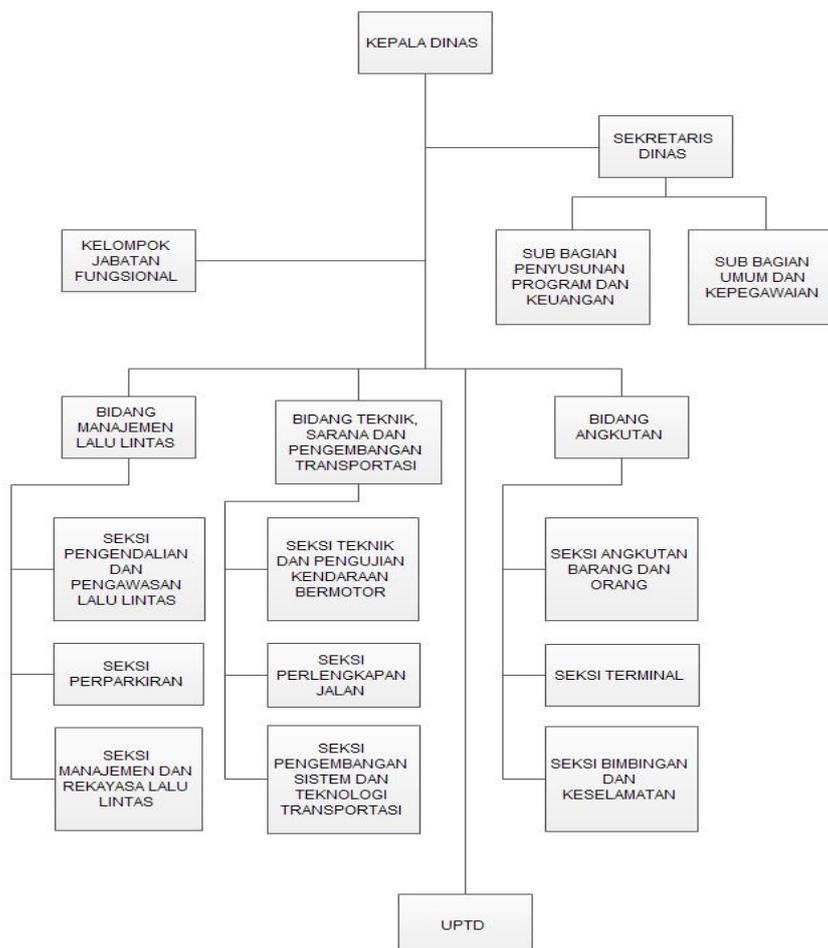
Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar sendiri berdiri tahun 1997 berdasarkan PERMENDAGRI No. 99 Tahun 1990 dengan Performa Tipe C, dimana belum terbentuk Dinas Perhubungan melainkan masih bergabung dengan provinsi sebagai anak cabang yang disebut DLLAJR Cabang Provinsi. Setelah terdapat UUD Otonomi Daerah Tahun 1997 terpisah dari provinsi menjadi kantor LLAJ pada tahun 2002, yang berubah menjadi Kantor Perhubungan. Anak cabang berdiri tahun 1996 keatas dan berubah menjadi kantor LLAJR pada tahun 1997 dipimpin oleh Ir. Mulyanto sampai dengan Kantor Perhubungan berubah menjadi LLAJ. Pada tahun 2002 ada perubahan nama menjadi Kantor Perhubungan. Sampai tahun 2004 Kantor Perhubungan dirubah menjadi Dinas Perhubungan dan dipimpin oleh Ir. Mulyanto sampai dengan setengah periode setelah itu diganti oleh Drs. Nono Soedarsono dan sempat bergabung dengan KOMINFO sudah berganti menjadi Dinas Perhubungan yang dipimpin oleh :

- a. Tahun 2008-2010 Dinas Perhubungan dipimpin oleh Drs.E.C. Akhmad Husein, M.si;
- b. Tahun 2010-2011 dipimpin oleh Hapiyanto Nugroho;
- c. Tahun 2012-2015 berganti kepemimpinan yang dijabat oleh Suyanto, S.H.,M.H;

- d. Tahun 2015-2017 kepemimpinan dijabat oleh Drs. Budi Kusumaharjo, M.Pd;
- e. Tahun 2017 sampai dengan sekarang Dinas Perhubungan dipimpin oleh Toha Mashuri S.Sos.,M.M;

Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar dalam hal Pengaturan, pengelolaan, pengawasan dan penertiban sarana angkutan / Lalu Lintas Angkutan Jalan (Darat) maupun sungai. Lebih banyak difokuskan dalam rangka penertiban, pengaturan disektor perhubungan darat dan beberapa proyek peningkatan pembangunan sarana dan prasarana disektor perhubungan.

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar tahun 2021.



Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar 2021

4) Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar

Tugas dan fungsi dinas perhubungan setiap departemen berbeda beda sesuai dengan departemennya masing-masing sebagai berikut:

a) Kepala Dinas Perhubungan

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati memerintah dan melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di Bidang Perhubungan serta tugas pembantuan, dalam melaksanakan tugas Kepala Dinas mempunyai fungsi :

1. Memvalidasi rencana dan program kerja dibidang perhubungan;
2. Kebijakan teknis bidang perhubungan;
3. Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perhubungan;
4. Mengkoordinasi pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang perhubungan;
5. Mengkoordinasi urusan-urusan tata usaha;
6. Implementasi tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b) Sekretaris

Membantu kepala dinas dalam mengumpulkan dan mengolah data dalam menyusun rencana program pemantauan evaluasi dan penyusunan laporan, menyelenggarakan ketatausahaan, administrasi kepegawaian, administrasi keuangan dan urusan umum serta memberikan pelayanan administrasi kepada semua unit kerja di lingkungan Dinas. Untuk melaksanakan tugas Sekretaris mempunyai fungsi:

1. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan dan program kerja Dinas;
2. Mengkoordinasikan latihan dan evaluasi hasil kerja Dinas;
3. Mengkoordinasikan hasil laporan hasil program kerja Dinas;
4. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bidang-bidang pada Dinas;
5. Mengkoordinasikan pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga, kehumasan dan keprotokolan;

6. Mengkoordinasikan pelaksanaan fungsi tata usaha keuangan pada Dinas;
7. Mengkoordinasikan pengelolaan administrasi pegawai dan kesejahteraan pegawai;
8. Mengkoordinasikan pengelolaan administrasi keuangan dan gaji pegawai;
9. Mengkoordinasikan pengelolaan dan pengadministrasian perlengkapan kantor, pemanfaatan dan perawatan investasi kantor;
10. Mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan teknis administrasi kepala dinas dan semua unit organisasi di lingkungan Dinas;
11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.

c) Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan

Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan, mempunyai tugas menyusun dan mengolah data rencana program Dinas, monitoring, evaluasi, pelaporan serta penyusunan laporan serta merencanakan anggaran pembiayaan, pengelolaan dan mengkoordinir penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan dinas. Untuk melaksanakan tugas, Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan mempunyai fungsi:

1. Merencanakan pengumpulan bahan dan menganalisa data guna menyusun rencana kegiatan dan program kerja Dinas;
2. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi serta penganalisaan hasil program kerja Dinas;
3. Menyusun penghimpunan dan penganalisaan data guna penyajian informasi tentang Dinas;
4. Menyusun bahan koordinasi dan menyusun laporan hasil program kerja Dinas;
5. Menyusun penghimpunan data dan penyiapan bahan kebutuhan dalam rangka penyusunan anggaran keuangan Dinas;

6. Menyusun pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Dinas;
7. Melaksanakan penyusunan, penatausahaan, verifikasi, dan pelaporan keuangan, serta pengujian pembayaran;
8. Melaksanakan penatausahaan kas dan urusan belanja anggaran kegiatan kebutuhan Dinas;
9. Melaksanakan penyusunan kebutuhan operasional, verifikasi data dan dokumen keuangan, serta pelaporan keuangan;
10. Melaksanakan penatausahaan data dan implementasi sistem informasi, pelaporan data dan perkembangan realisasi permintaan pembayaran keuangan dan perkembangan realisasi pencairan anggaran;
11. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

d) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kepegawaian, surat menyurat, perlengkapan dan rumah tangga, memelihara barang-barang inventaris, serta laporan berkala. Untuk melaksanakan tugas, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

1. Merencanakan penyelenggaraan urusan administrasi kepegawaian lingkungan Dinas;
2. Merencanakan penyelenggaraan urusan rumah tangga, rapat-rapat, tamu-tamu dinas dan pelaksanaan kehumasan;
3. Merencanakan penyelenggaraan urusan ketatausahaan, surat menyurat dan kearsipan;
4. Menyusun rencana kebutuhan barang, kebutuhan operasional kantor, termasuk inventarisasi barang, pengadaan, perawatan dan pemeliharaan barang perlengkapan Dinas;
5. Melaksanakan penertiban, pengamanan dan pemeliharaan kebersihan kantor dan lingkungan sekitarnya;
6. Menyusun laporan tahunan tentang barang inventarisasi kantor;

7. Melaksanakan tugas–tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

e) Seksi Pengendalian dan Pengawasan Lalu Lintas

Kepala Seksi Pengendalian dan Pengawasan Lalu Lintas mempunyai tugas penyusunan rencana dan program kerja, melaksanakan pengawasan pengendalian dan pengaturan lalu lintas serta melakukan inventarisasi daerah rawan kecelakaan lalu lintas. Untuk melaksanakan tugas, Kepala Seksi Pengendalian dan Pengawasan Lalu Lintas mempunyai fungsi:

1. Menyusun pengumpulan data, penyusunan rencana dan program kerja dibidang pengendalian dan pengawasan lalu lintas; Menyusun bahan Perumusan Kebijakan Teknis Pengendalian dan Pengawasan Lalu Lintas di wilayah kabupaten;
2. Merencanakan penegakan hukum di bidang lalu lintas dan angkutan orang dan barang;
3. Melaksanakan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian lalu lintas darat serta melakukan koordinasi penyelenggaraan lalu lintas darat yang berada di wilayah kabupaten;
4. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan terhadap kelebihan muatan;
5. Melaksanakan pengawasan, inventarisasi dan pendataan daerah rawan kecelakaan;
6. Menyelenggarakan pemberian izin dispensasi kelas jalan untuk angkutan barang pada jalan kabupaten;
7. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai bidang tugasnya.

f) Bidang Manajemen Lalu Lintas

Kepala Bidang Manajemen Lalu Lintas mempunyai tugas menyusun rencana, program kerja, kebijakan teknis dibidang

pengendalian, pengawasan dan melakukan manajemen dan pengawasan perparkiran untuk umum, serta melaksanakan manajemen dan rekayasa lalu lintas. Untuk melaksanakan tugas, Kepala Bidang Manajemen Lalu Lintas mempunyai fungsi:

1. penyusunan rencana dan program kerja dibidang pengendalian dan pengawasan, manajemen dan rekayasa serta perparkiran untuk umum;
2. Mengkoordinasikan Merumuskan kebijakan teknis dibidang pengendalian, pengawasan, perparkiran, manajemen dan rekayasa lalu lintas;
3. Melaksanakan manajemen dan rekayasa lalu lintas;
4. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan lalu lintas;
5. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan manajemen parkir untuk umum;
6. Memverifikasi dokumen analisis dampak lalu lintas;
7. Menetapkan jaringan jalan kabupaten;
8. Menginventarisasi daerah rawan kecelakaan;
9. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tuPengawasan Lalu Lintas di wilayah Kabupaten;
10. Merencanakan penegakan hukum di bidang lalu lintas dan angkutan orang dan barang;
11. Melaksanakan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian lalu lintas darat serta melakukan koordinasi penyelenggaraan lalu lintas darat yang berada di wilayah Kabupaten;
12. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan terhadap kelebihan muatan;
13. Melaksanakan pengawasan, inventarisasi dan pendataan daerah rawan kecelakaan;
14. Menyelenggarakan pemberian izin dispensasi kelas jalan untuk angkutan barang pada jalan Kabupaten;
15. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai bidang tugasnya.

g) Seksi Perparkiran

Kepala Seksi Perparkiran mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program kerja, manajemen dan pengawasan, menetapkan lokasi serta pemberian rekomendasi fasilitas parkir untuk umum. Untuk melaksanakan tugas, Kepala Seksi Perparkiran mempunyai fungsi:

1. Mengumpulkan data, menyusun rencana dan program kerja dibidang perparkiran;
2. Merumuskan Kebijakan teknis perparkiran di wilayah Kabupaten;
3. Melaksanakan perencanaan dan penetapan lokasi parkir untuk umum;
4. Melaksanakan penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum;
5. Memberikan rekomendasi izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum;
6. Menghimpun dan menganalisa data guna pengelolaan dan manajemen parkir untuk umum;
7. Mengadakan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan perparkiran baik yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten maupun pihak ketiga;
8. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai bidang tugasnya.

h) Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

Kepala Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas mempunyai tugas melakukan penyusunan perencanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta menetapkan jaringan transportasi jalan. Untuk melaksanakan tugas, Kepala Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas mempunyai fungsi:

1. Menyusun pengumpulan data, penyusunan rencana dan program kerja di bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas;
2. Menyusun bahan perumusan kebijakan teknis manajemen dan rekayasa wilayah Kabupaten;
3. Melaksanakan manajemen lalu lintas jalan Kabupaten;

4. Menyusun bahan dan data dalam rangka rekayasa lalu lintas;
5. Melaksanakan manajemen dan rekayasa lalu lintas dengan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk jaringan jalan Kabupaten;
6. Memberikan persetujuan untuk hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN);
7. Menyusun dan menetapkan rencana kelas jalan di jalan Kabupaten;
8. Menyusun dan menetapkan rencana jaringan transportasi jalan tingkat Kabupaten;
9. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai bidang tugasnya.

i) Bidang Teknik, Sarana dan Pengembangan Transportasi

Kepala Bidang Teknik, Sarana dan Pengembangan Transportasi mempunyai tugas menyusun rencana, program kerja, kebijakan teknis dibidang teknik pengujian kendaraan bermotor dan perlengkapan jalan di wilayah Kabupaten, menetapkan rencana induk transportasi Kabupaten serta menyusun kebijakan pengembangan sistem dan tehknologi transportasi. Untuk melaksanakan tugas, Kepala Bidang Teknik, Sarana dan Pengembangan Transportasi mempunyai fungsi:

1. Memverifikasi rencana dan program kerja dibidang teknik dan pengujian kendaraan bermotor, fasilitas jalan serta pengembangan sistem dan teknologi transportasi;
2. Merumuskan kebijakan teknis pengujian kendaraan bermotor, fasilitas jalan serta pengembangan sistem dan teknologi transportasi;
3. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor;
4. Menetapkan, pengadaan, pemasangan serta pemeliharaan fasilitas jalan;
5. Merencanakan dan menetapkan jaringan kereta api lokal Kabupaten;
6. Memverifikasi rencana induk LLAJ Kabupaten;
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

j) Seksi Teknik dan Pengujian Kendaraan Bermotor

Kepala Seksi Teknik dan Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai tugas menyusun rencana, program kerja, perumusan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis dan melaksanakan koordinasi pengujian kendaraan bermotor, penetapan daya angkut serta pembinaan bengkel umum dan karoseri kendaraan bermotor. Untuk melaksanakan tugas, Kepala Seksi Teknik dan Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai fungsi:

1. Menyusun pengumpulan data, menyusun rencana dan program kerja dibidang pengujian kendaraan bermotor;
2. Menyusun bahan perumusan kebijakan teknis pengujian kendaraan bermotor di wilayah Kabupaten;
3. Melaksanakan koordinasi pengujian berkala kendaraan bermotor;
4. Memberikan petunjuk–petunjuk teknis tentang ketentuan persyaratan kendaraan wajib uji dan penetapan daya angkut kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan perundang–undangan yang berlaku;
5. Menyelenggarakan pengawasan dan pembinaan teknis kepada perusahaan karoseri dan perbengkelan kendaraan bermotor;
6. Melaksanakan pemeriksaan dan penilaian terhadap kendaraan dinas milik pemerintah yang akan dihapuskan dari inventaris;
7. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai bidang tugasnya.

k) Seksi Perlengkapan Jalan

Kepala Seksi Perlengkapan Jalan mempunyai tugas menyusun rencana, program kerja, kebijakan teknis, penetapan, pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan jalan di wilayah Kabupaten. Untuk melaksanakan tugas, Kepala Seksi Perlengkapan Jalan mempunyai fungsi:

1. Menyusun pengumpulan data, menyusun rencana dan program kerja dibidang perlengkapan jalan;
2. Menyusun bahan perumusan kebijakan teknis perlengkapan jalan di wilayah Kabupaten;

3. Menyusun dan menentukan rencana lokasi serta pengadaan dan pemasangan kebutuhan perlengkapan lalu lintas (rambu jalan, marka jalan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendalian pengaman pemakai jalan) serta fasilitas pendukung di jalan Kabupaten;
4. Melaksanakan perawatan perlengkapan jalan;
5. Menyusun penghimpunan data, pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan jalan dalam wilayah Kabupaten;
6. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai bidang tugasnya.

l) Seksi Pengembangan Sistem Dan Teknologi Transportasi

Kepala Seksi Pengembangan Sistem dan Teknologi Transportasi mempunyai tugas menyusun rencana, program kerja, kebijakan teknis, penataan dan pengembangan sistem dan teknologi transportasi darat, laut serta udara di wilayah Kabupaten. Untuk melaksanakan tugas, Kepala Seksi Pengembangan Sistem dan Teknologi Transportasi mempunyai fungsi:

1. Menyusun pengumpulan data, menyusun rencana dan program kerja dibidang pengembangan sistem dan teknologi transportasi;
2. Menyusun bahan perumusan Kebijakan Teknis Pengembangan Sistem dan Tehknologi Transportasi di wilayah Kabupaten;
3. Menyusun bahan rencana induk LLAJ Kabupaten;
4. Menyusun bahan rencana penataan sistem transportasi wilayah Kabupaten;
5. Menyusun bahan rencana pengembangan sarana dan prasarana transportasi;
6. Menyusun bahan rencana pengembangan transportasi berkelanjutan;
7. Menyusun jaringan kereta api lokal Kabupaten;
8. Menyusun bahan pengembangan studi dan penelitian masalah-masalah transportasi;
9. Menyusun bahan kegiatan pengembangan dan penerapan sistem informasi dan teknologi di bidang transportasi;

10. Merencanakan pembinaan dan pengawasan perlintasan untuk keselamatan perjalanan kereta api dan pengguna jalan serta pemakaian jalan perlintasan sebidang yang tidak mempunyai izin dan tidak ada penanggung jawabnya, dilakukan oleh pemilik dan atau pemerintah daerah;
11. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai bidang tugasnya.

m) Bidang Angkutan

Kepala Bidang Angkutan mempunyai tugas menyusun rencana, program kerja, kebijakan teknis di bidang angkutan darat, sungai, danau dan penyeberangan, terminal transportasi serta memberikan bimbingan keselamatan lalu lintas. Untuk melaksanakan tugas, Kepala Bidang Angkutan mempunyai fungsi:

1. Mengkoordinasikan pengumpulan data penyusunan rencana dan program kerja dibidang angkutan darat, sungai, danau dan penyeberangan, terminal transportasi, serta bimbingan keselamatan;
2. Merumuskan kebijakan teknis dibidang angkutan darat, sungai danau dan penyeberangan, terminal transportasi, serta keselamatan lalu lintas;
3. Mengkoordinasikan bimbingan teknis usaha angkutan darat, sungai, danau dan penyeberangan;
4. Mengkoordinasikan manajemen dan penyelenggaraan terminal penumpang tipe C, terminal barang serta halte untuk angkutan orang dan barang;
5. Mengkoordinasikan penyusunan jaringan trayek angkutan pedesaan dan angkutan perkotaan di dalam wilayah Kabupaten;
6. Memverifikasi pemberian izin lokasi lapangan terbang khusus pendaratan helikopter (Helipad);
7. Memberikan bimbingan keselamatan transportasi.

n) Seksi Angkutan Barang dan Orang

Kepala Seksi Angkutan Barang dan Orang mempunyai tugas menyusun rencana, program kerja, kebijakan teknis, angkutan orang,

barang, sungai, danau dan penyeberangan, penetapan jaringan trayek angkutan, penetapan tarif kelas ekonomi. Untuk melaksanakan tugas, Kepala Seksi Angkutan Barang dan Orang mempunyai fungsi:

1. Menyusun pengumpulan data, menyusun rencana dan program kerja dibidang angkutan barang dan orang;
2. Menyusun bahan perumusan kebijakan teknis angkutan orang dan barang di wilayah Kabupaten;
3. Menyusun perencanaan, pengembangan evaluasi jaringan trayek dan penetapan kebutuhan angkutan;
4. Merencanakan penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan atau barang dalam daerah Kabupaten;
5. Menyusun bahan penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek perdesaan dan perkotaan dalam wilayah Kabupaten;
6. Menyusun bahan penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antar kota dalam wilayah Kabupaten serta angkutan perkotaan dan pedesaan yang wilayah pelayanannya dalam wilayah Kabupaten;
7. Menyiapkan pemberian bimbingan teknis perizinan angkutan orang dan barang tertentu yang bersifat khusus serta pengawasan penyelenggaraannya;
8. Menyusun bahan penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai danau dan penyeberangan sesuai dengan domisili orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha;
9. Menyusun bahan penerbitan izin trayek penyelenggaraan angkutan sungai danau dan penyeberangan untuk kapal yang melayani trayek dalam daerah Kabupaten;
10. Melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai bidang tugasnya.

o) Seksi Terminal

Kepala Seksi Terminal mempunyai tugas menyusun rencana, program kerja, perumusan kebijakan teknis, penetapan lokasi, manajemen

dan penyelenggaraan terminal tipe C, terminal barang dan halte untuk angkutan orang dan barang. Untuk melaksanakan tugas, Kepala Seksi Terminal mempunyai fungsi:

1. Menyusun pengumpulan data, menyusun rencana dan program kerja di bidang terminal;
2. Menyusun bahan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan terminal tipe C di wilayah Kabupaten;
3. Merancang manajemen dan penyelenggaraan terminal tipe C;
4. Menyusun perencanaan, penetapan, peninjauan lokasi, pembangunan dan pengembangan terminal dan halte untuk angkutan orang dan barang;
5. Merencanakan pengelolaan dan pemeliharaan fisik serta pengendalian ketertiban terminal dan halte untuk angkutan orang dan barang;
6. Menyusun bahan penetapan lokasi terminal barang;
7. Menyusun bahan pemberian izin lapangan terbang khusus pendaratan helikopter (Helipad);
8. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai bidang tugasnya.

p) Seksi Bimbingan dan Keselamatan

Kepala Seksi Bimbingan dan Keselamatan mempunyai tugas menyusun rencana, program kerja dan kebijakan teknis dibidang bimbingan dan keselamatan pengguna dan penyedia jasa angkutan darat, sungai dan penyeberangan serta memberikan bimbingan dan pengenalan lalu lintas terhadap pelajar. Untuk melaksanakan tugas, Kepala Seksi Bimbingan dan Keselamatan mempunyai fungsi:

1. Menyusun pengumpulan data, menyusun rencana dan program kerja dibidang bimbingan dan keselamatan;
2. Menyusun bahan perumusan kebijakan teknis bimbingan keselamatan di wilayah Kabupaten;

3. Menyusun penghimpunan data sebagai bahan pemberian pembinaan, arahan dan bimbingan kepada pengguna dan penyedia lalu lintas, darat, sungai dan penyeberangan di wilayah Kabupaten;
4. Menyusun bahan dalam rangka melaksanakan pelatihan dan bantuan teknis keselamatan kepada pengguna dan penyedia lalu lintas darat, sungai dan penyeberangan di wilayah Kabupaten;
5. Merencanakan bimbingan teknis dan rekomendasi perizinan terhadap sekolah mengemudi;
6. Merencanakan pemberian bimbingan, pengenalan keselamatan lalu lintas terhadap pelajar;
7. Merencanakan audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan Kabupaten;
8. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai bidang tugasnya.

4.2 Hasil Analisis dan Pembahasan

4.2.1 Peran Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar Dalam Melaksanakan Program Parkir Berlangganan di Wilayah Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar.

Peran Dinas Perhubungan sangat penting salah satunya untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat yang menangani bidang transportasi secara umum termasuk mengatur dan menetapkan mengenai program parkir berlangganan. Dinas Perhubungan dalam menjalankan tugasnya khususnya dalam hal perparkiran mempunyai staf bidang seksi perparkiran merupakan salah satu bagian dari Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar yang dimana dapat melakukan tugas pokok dengan semestinya guna untuk melakukan pembinaan, pengawasan atau monitoring. Tujuan utama dari bidang seksi perparkiran tersebut, agar dapat melayani masyarakat pengguna layanan parkir berlangganan maupun parkir tidak berlangganan serta dapat, memfasilitasi masyarakat dalam bidang perparkiran. Untuk melaksanakan program parkir berlangganan ini Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar juga

bekerja sama dengan SAMSAT Kabupaten Blitar guna mempermudah pelayanan masyarakat.

a). Peran Dinas Perhubungan Sebagai pengatur

Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar menyediakan layanan program parkir berlangganan ini untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan parkir yang memadai, aman, dan terjangkau. Dalam melaksanakan program parkir berlangganan Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar mengacu pada Peraturan Daerah No.23 Tahun 2011 tentang Jasa Umum yang didalamnya tertuang pada pasal 44 yang berbunyi “Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan parkir di tepi jalan umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.” Penetapan lokasi dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum, dilakukan dengan memperhatikan rencana umum tata ruang daerah, keselamatan dan kelancaran lalu lintas kelestarian lingkungan, dan kemudahan bagi pengguna jasa. Penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum dilakukan oleh pemerintah, badan hukum Negara atau warga negara penyelenggara fasilitas parkir untuk umum dapat memungut biaya terhadap pengguna fasilitas yang diusahakan. Pada Peraturan Daerah No.23 Tahun 2011 tentang Jasa Umum pasal 50 telah dijelaskan bahwa:

Struktur besaran tarif retribusi parkir di tepi jalan umum sebagai berikut:

- a. Sepeda motor Rp. 500,00
- b. Kendaraan roda 4 (empat) JBB \leq 3.500 Rp. 1.000,00
- c. Kendaraan roda 4 (empat) JBB \geq 3.500 Rp. 1.500,00
- d. Roda 2 (dua) secara berlangganan sebesar Rp. 15.000,00/tahun
- e. Roda empat atau lebih secara berlangganan sebesar Rp. 25.000,00/tahun

Penetapan tarif retribusi ini Guna untuk melakukan pengaturan, pembinaan, mengendalikan dan juga pengawasan atas pemanfaatan fungsi ruang yang sudah ditetapkan. sebagai sara lahan parkir guna melindungi kepentingan pelayanan umum kepada masyarakat.

Seperti yang dikemukakan oleh Bapak Yudi selaku kasi perparkiran: *“Program parkir berlangganan itu memperingan khususnya bagi pemilik*

kendaraan berplat nomor kabupaten Blitar, untuk R2 Selama setahun 15.000 dan R4 25.000 dan mereka di kenakan retribusi setahun sekali saat membayar pajak di Samsat, dan mereka di berikan bukti stiker program parker berlangganan”

Pernyataan ini menandakan bahwa Dinas Perhubungan dalam melaksanakan perannya sebagai pengatur telah terlaksana karena sesuai dengan perda yang berlaku retribusi ini memudahkan masyarakat. Penyelenggaraan tata kelola parkir dalam penerapannya telah dilandasi serta telah didukung oleh peraturan yang menjadi pedoman didalam sebuah penyelenggaraan tata kelola pelayanan parkir. Kondisi tersebut, sangat berperan penting dikarenakan telah adanya sebuah aturan yang dimana keputusan tersebut kemudian dapat dijadikan sebuah pedoman pemerintah daerah guna untuk menyelenggarakan sebuah pelayanan parkir kepada masyarakat.

b). Peran Dinas Perhubungan Sebagai Pengarah

Terkait peran Dinas Perhubungan Kabupten Blitar dalam melaksanakan program parkir berlangganan ialah sebagai Pembina operasional di lapangan dengan melaksanakan giat monitoring yang dilaksanakan pada tiap-tiap titik parkir yang di lakukan seminggu 2-3 kali serta melakukan pembinaan yang di lakukan 1 bulan sekali dan juga memberikan aturan dan sanksi kepada setiap juru parkir yang melakukan pelanggaran.

Berikut penuturan dari bapak Huda selaku Staf parkir Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar *“Parkir (jukir) kita kumpulkan setiap 1bulan nanti kita pertemuan besar setiap tanda tangan kontrak setiap 6 bulan sekali jadi nanti bila dikhawatirkan terjadi apa-apa terus apa berhenti nanti di tentukan pada saat penandatanganan kontrak tersebut”*.

Penuturan yang dikatakan oleh bapak Huda merupakan sebuah tindakan dalam mengarahkan berjalannya program parkir berlangganan agar berjalan dengan baik, dengan melaksanakan pembinaan setiap 1 bulan sekali dalam

rangka evaluasi kinerja dari jukir dan melaksanakan penetapan keputusan setiap 6 bulan sekali pada saat penandatanganan kontrak.

c). Peran Dinas Perhubungan Sebagai Pelaksana

Peran Dinas Perhubungan sebagai pelaksana program parkir berlangganan ditunjukkan dengan adanya Sosialisasi kepada masyarakat dan monitoring juru parkir.

1. Sosialisasi

Sosialisasi ini dilakukan ketika masyarakat membayarkan pajak tahunan di SAMSAT serta melalui media sosial dan elektronik seperti radio dan facebook. . Diharapkan melalui facebook ini, dapat menunjang percepatan penyebaran, pengetahuan, dan pemahaman masyarakat akan pentingnya parkir berlangganan. Selain itu, juga memudahkan masyarakat untuk menyampaikan pertanyaan, kritik, dan saran seputar parkir berlangganan kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar. Pelaksanaan program parkir berlangganan Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar sudah melakukan lewat media social seperti lewat radio seta memberikan sarana sebuah group Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar untuk media sharing dan pengaduan masyarakat.

2. Monitoring Juru Parkir

Monitoring juru parkir sering dilaksanakan dengan giat 1-2 kali setiap minggunya menggunakan sistim bergantian disetiap wilayah dengan tujuan agar juru parkir bekerja dengan baik dan bekerja sesuai aturan yang telah di tetapkan dan mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan. Selain pengawasan terhadap juru parkir resmi Dinas perhubungan juga melakukan evaluasi terhadap juru parkir liar yang seringkali membuat tidak nyaman masyarakat dalam melaksanakan tugasnya Dinas Perhubungan (kasi perparkiran) juga mendengarkan keluhan dari masyarakat

4.2.2 Faktor Penghambat Program Parkir Berlangganan

a). Kurangnya Pemahaman Masyarakat Mengenai Program Parkir Berlangganan

Pemahaman mengenai program parkir berlangganan di Kabupaten Blitar adalah suatu kendala atau masalah yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan. Salah satunya dibuktikan dengan masyarakat tetap membayar parkir pada juru parkir resmi walaupun tidak diminta dan sering kali masyarakat tidak menempelkan stiker bukti bahwa masyarakat sudah membayar parkir berlangganan. Dalam pengisian quisioner masyarakat di temukan bahwa sebagian besar tidak mengetahui apa itu program parkir berlangganan diketahui dari pengisian quisioner yang asal-asalan bahkan tidak tahu sama sekali.

Seperti yang dikemukakan oleh Bapak Fajar selaku staf perparkiran:

“Program parkir berlangganan sudah lama di terapkan tetapi masyarakat banyak yang tidak tahu tentang kesadaran menempel stiker paker berlangganan tersebut, karena itu banyak masayarakat yang ditarik biaya saat paker. Dan sebenarnya juru paker di lapangan itu sudah di beri rompi yang bertuliskan juru paker itu sebagai tanda juru paker resmi. Jika tidak menggunakan rompi tersebut berarti itu bukan juru paker resmi dan nantinya jika paker di suatu tempat dan yang menjaga itu bukan juru paker resmi tentu harus membayarnya”.

b). Banyak Masyarakat Yang Tidak Menempelkan Bukti Membayar Parkir Berlangganan

Bukti pembayaran parkir berlangganan di Kabupatem Blitar ini berupa stiker berhologram yang harus ditempel di plat nomor kendaraan, agar juru parkir resmi mudah untuk mengenali bahwa kendaraan tersebut sudah membayar parkir berlangganan setiap tahunnya sehingga tidak perlu ditarik retribusi lagi. Akan tetapi masyarakat terlalu mengabaikan hal itu dan sangat jarang ditemui kendaraan yang plat nomornya ditemplei stiker. Masyarakat beranggapan bahwa stiker yang ditempelkan pada plat nomor akan memperjelek penampilan montor, selain itu masyarakat enggan menempelkan karena stiker mudah rusak jika terkena air dan panas secara terus menerus.

Seperti yang dikemukakan Bapak Lukman selaku petugas SAMSAT:

“Untuk masalah penempelan stiker itu sudah ada arahan dari samsat dan walaupun masih ada yang tidak menempelkan di kendaraan kemungkinan takut rusak maka dari itu kebanyakan di temple di STNK”.

Begitu juga yang dikemukakan Bapak Yudi selaku kasi perparkiran:

“masalah stiker di ambil atau tidak itu kembali lagi kepada masyarakatnya bahwa kita setiap kali petugas di samsat wajib memberikan dan mereka yang diberikan itu sekali lagi itu ditempelkan atau tidak itu kembali kepada mereka sendiri, dan mereka merasakurang srekk banyak yang di masukan di dompet, dan untuk kualitas stiker sendiri itu kita sudah sebelum di cetak itu kita sudah memferifikasi dulu dudah layak apa belum karena dari uang retibusi itu di gunaan untuk pengadaan stiker dan di situ kita sudah dengan nominal sekian ini kita sudah layakkah di berikan kepada masyarakat jadi kita memberikan yang asal-asalan seperti itu”.

Pernyataan ini menandakan bahwa kurangnya kesadaran masyarakat untuk menempel stiker parkir sangat serius karena kebanyakan masyarakat hanya menyimpan stiker tersebut didalam dompet mereka, hal ini yang membuat juru parkir resmi susah untuk mengenali apakah kendaraan ini sudah membayar parkir berlangganan atau belum.

c). Kurangnya Juru Parkir Resmi

Kecamatan Wlingi memiliki luas wilayah 66,36 km² dibagi menjadi 9 Desa/Kelurahan yaitu 5 Kelurahan dan 4 Desa. Desa Ngadirenggo merupakan desa yang terluas dengan luas 40,77 km². Desa dengan luas wilayah terkecil adalah Desa Tembalang dengan luas wilayah 1,24 km² atau hanya 1,86 persen dari luas wilayah Kecamatan. Berdasarkan pmutakhiran Master File Desa BPS Kabupaten Blitar, Kecamatan Wlingi terbagi dalam 9 Desa atau Kelurahan, 43 Dusun atau Lingkungan, 93 RW, 265 RT. Kecamatan Wlingi adalah daerah yang luas akan tetapi hanya mempunyai 25 juru parkir resmi, banyak sekali di daerah Wlingi juru parkir liar yang masih menggunakan bahu jalan dan terkadang pada even-even tertentu retribusi yang diminta oleh juru parkir liar sangat mahal. Kebanyakan dari mereka berpenampilan seperti

preman sehingga masyarakat takut jika menolak untuk tidak membayar parkir, dan jukir-jukir liar tersebut hanya meminta upah tanpa mau membantu untuk menata kendaraan agar parkir lebih rapi. Sehingga perlu adanya penambahan juru parkir resmi agar pelayanan dalam masyarakat lebih efisien serta masyarakat merasa aman dan nyaman.

Tabel 4.1 Juru Parkir di Wilayah Wlingi

No.	Nama Juru Parkir	Tempat Kerja Parkir
1.	Widodo	Jl. Urip Sumoharjo, Wlingi
2.	Sunaryo	Jl. Urip Sumoharjo, Wlingi
3.	Bambang Irawan	Jl. Urip Sumoharjo, Wlingi
4.	Rochmad	Jl. Urip Sumoharjo, Wlingi
5.	Dodik Setyawan	Depan toko “Eka Wijaya”, Wlingi
6.	Eko Wahyudi	Halaman SAMSAT Wlingi
7.	Eko Yudiono	Depan bakso, mie solo, Pandean Wlingi
8.	Andriyas. S	Depan warung pecel, Pandean Wlingi
9.	Totok Suwanto	Halaman SAMSAT Wlingi
10.	Suharnadi	Halaman terminal Wlingi
11.	Sukatno	Depan Bank BRI Unit Tangkil, Wlingi
12.	Jumari	Halaman terminal Wlingi
13.	Triyono	Depan pasar Wlingi
14.	Imam Bukhori	Depan pasar Wlingi
15.	Sudarwito	Jl. Bromo Utara, Wlingi
16.	Suwuh Cahyo C	Jl. Bromo, Wlingi
17.	Sumarni	Depan pasar Wlingi
18.	Hari Purwo	Depan toko “Sriwijaya”, Wlingi
19.	Subagyo	Depan toko “Timur”, Wlingi
20.	Eko Suprihatin	Utara pasar Wlingi
21.	Agus Mulyono	Depan Bank M andiri, Wlingi
22.	Sunardi	Halaman terminal Wlingi

23.	Rengga Dwi P.	Halaman terminal Wlingi
24.	Harianto	Halaman terminal Wlingi
25.	Lantur Suherman	Depan pasar Wlingi

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar 2020.

Tentunya hal ini sangat berpengaruh terhadap kepuasan masyarakat tentang program parkir berlangganan apalagi dalam kenyataannya masyarakat juga masih banyak yang tidak tahu tentang program tersebut perlunya penambahan juru parkir sangatlah penting dan juga sosialisasi harus giat dilaksanakan.

Diketahui dari hasil wawancara bersama bapak Yudi mengatakan *“Kita juga melibatkan masyarakat bahwa kita terkendala tenaga operasional khususnya pada kawasan di 22 Kecamatan kita juga tidak bisa melihat 1x24 jam maka itu kita juga meminta bantuan dari masyarakat sendiri terkait pengaduan seperti itu dan kita sendiri juga bertetirimakasih kepada masyarakat yangyang tidak berkenan dengan masih adanya pungutan e.. khususnya parker yang menggunakan bahu jalan”*.

Tentunya hal ini sangat berpengaruh terhadap kepuasan masyarakat tentang program parkir berlangganan apalagi dalam kenyataannya masyarakat juga masih banyak yang tidak tahu tentang program tersebut perlunya penambahan juru parkir sangatlah penting dan juga sosialisasi harus giat dilaksanakan.

d). Kurangnya Petugas Monitoring Juru Parkir

Monitoring yang dilakukan pihak Dinas Perhubungan dan pihak external yang telah dilakukan setiap satu minggu dua kali dirasa tidak optimal dikarenakan luasnya wilayah monitoring dan kurangnya petugas pelaksana di lapangan.

Seperti yang dikatakan oleh bapak Yudi selaku kasi perparkiran Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar *“e.. untuk itu seksi parker itu ada di bidang LALIN di seksi parker sendiri ada cuma 4orang sedangkan di sini yang harus kita monitoring itu melebihi dari tenaga kita sendiri jadi kita tiap hari itu*

tidak hanya 1 titik tetapi ya.. seperti itu kita tidak bisa mengawasi 1x24 jam, e.. bisa memonitoring mereka jadi ya itu kita juga memintabantuan masyarakat dan itu jelas dan itu dimana kita lanjut dan kita akan tindak”.

Diketahui dari hasil wawancara di atas petugas monitoring hanya berjumlah 4 orang yang harus melaksanakan pengawasan di 22 Kecamatan tentunya hal ini kurang efektif dalam penanganannya.

e). Sikap Juru Parkir

Sikap juru parkir dalam melakukan tugasnya masih memiliki sikap yang belum memadai. Dalam praktek pelayanan parkir tepi jalan umum ditemui masih banyaknya petugas juru parkir masih mendapat kritikan oleh masyarakat karena dampak dari kurangnya pengetahuan masyarakat tentang program parkir berlangganan atau belum mengetahui secara pasti perbedaan jukir resmi dan ilegal dan menilai sikap juru parkir secara keseluruhan itu sama.

Seperti yang di katakan oleh bapak Eko selaku jukir di wilayah Kecamatan Wlingi *“Ya insyaallah saya tahu om.. soalnya gini orang awam itu dalam artian masyarakat umum itu belum tahu, belum bisa membedakan mana jukir resmi mana jukir liar la meraka itu ngertinya begitu bayar di Samsat itu kalo di tep jalan itu bebas parkir, tapi kan dalam kenyataannya di seluruh wilayah Kabupaten kan kurang personil dalam artian jumlah orangnya kurang, titik-tiknya banyak jadi masyarakat itu tahunya gimana yaa.. semua itu pukul rata tidak bisa membedakan antara yang resmi dan yang tidak om”.*

Dikatakan bahwa masyarakat belum mengerti perbedaan juru parkir resmi dan ilegal masyarakat menganggap kebanyakan semua juru parkir itu sama walaupun juru parkir resmi Dinas Perhubungan sudah di bekali ilmu yang mumpuni tapi masih terlihat kurang dimata masyarakat karena mayoritas juru parkir masih dikuasai juru parkir ilegal.

4.2.3 Kondisi di Lapangan Tentang Berjalanya Program Parkir Berlangganan di Kecamatan Wlingi

Dalam pengamatan observasi di lapangan di wilayah Kecamatan Wlingi memang diketahui bahwa masyarakat memang belum menerima sosialisasi mengenai program parkir berlangganan sehingga masyarakat masih banyak sekali yang tidak paham tentang program tersebut. Masyarakat juga masih enggan menempelkan bukti pembayaran pajak program parkir berlangganan karena memang masyarakat belum sadar dan mengerti dengan kegunaan stiker tersebut. Kurangnya juru parkir resmi Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar di wilayah Kecamatan Wlingi yang membuat masyarakat menganggap program tersebut tidak ada gunanya. Kurangnya sikap juru parkir resmi yang masih mau menerima uang pemberian masyarakat yang tidak tahu tentang program tersebut di katakatakan oleh bapak Yudi (Kasi Parkir) bahwa

“Dan mereka memang sukarela memberikan uang kepada juru parker dan kita sudah mensosialisasikan kepada Jukir bahwa menerima memunggut itu tidak di perbolehkan dan di kontrak sudah di tuisikan kalo mereka memungut atau menerima uang akan di berikan sanksi secara tegas dan bisa di behentikan”

Diketahui bahwa sebenarnya juru parkir resmi dilarang memungut ataupun menerima uang dari masyarakat dengan dalih mereka ikhlas memberikan tapi dalam hal ini ada sebuah pernyataan yang perlu diketahui terutama bagi juru parkir resmi Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar bahwa sebenarnya masyarakat memberikan uang retribusi karena memang benar ikhlas atau tidak mengerti mengenai program tersebut dan yang menjadi sebuah permasalahan sikap juru parkir ialah langsung menerima uang retribusi tersebut tanpa memberitahukan tentang program parkir berlangganan tersebut. Kurangnya petugas monitoring juga menjadi permasalahan dalam pengawasan.

4.2.4 Upaya Dinas Perhubungan

a). Memberikan Sosialisasi Kepada Masyarakat

Dinas Perhubungan dapat memberikan sosialisasi kepada masyarakat pada waktu mereka membayarkan pajak tahunan selain itu sosialisasi program parkir berlangganan juga ada di media sosial seperti facebook dan media elektronik seperti radio, serta menghimbau mereka untuk menempelkan stiker bukti bahwa mereka telah membayarkan program parkir berlangganan ini. Perlu adanya sanksi tegas dan nyata agar masyarakat mau menempelkan stiker parkir berlangganan, selain untuk mempermudah mengenali kendaraan mana yang sudah membayar parkir berlangganan hal ini juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sehingga tidak lagi terjadi juru parkir nakal yang tetap meminta retribusi.

Seperti yang dikatakan Bapak Huda selaku staf monitoring perpajakan: *“Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar mengadakan program paker berlangganan tentunya kita sebagai staf sudah ikut mensosialisasikan kepada masyarakat tentang program paker berlangganan, pertama yang di ambil adalah dengan cara media sosial lewat radio, hp meskipun tahun itu belum ada hp, selanjutnya lewat secara langsung tertulis di setiap tempat titik-titik paker disitu tetera himbauan atau larangan untuk membayar dalam bentuk apapun terhadap jukir, yang seterusnya setiap tahun tetap kita gerakkan dan galakkan kalo masyarakat yang belum tahu itu banyak faktor memang dia kurang terjun dimedsos karena Dinas Perhubungan sudah memfasilitasi sebuah group Dinas Perhubungan jadi bila ada masyarakat yang kurang paham bisa langsung di tanyakan ke group, nanti setiap pertanyaan akan kami jawab.”*

Dari hasil wawancara yang dikatakan oleh bapak Huda Dinas Perhubungan sudah melakukan upaya-upaya dalam mensosialisasikan kepada masyarakat tetapi sebagian besar masyarakat pada kenyataannya masih tidak tahu tentang sosialisasi tersebut.

b). Memberikan Pembinaan Juru Parkir

Pembinaan dalam bidang operasional diantaranya meliputi, sebuah penataan parkir, pengguna lahan parkir yang dimana harus sesuai dengan marka jalan. Juru parkir tidak melakukan pelanggaran atas wilayah titik parkir atau tempat batas parkir yang telah ditentukan. Media yang digunakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar yaitu media komunikasi kekeluargaan dalam bentuk rapat yang dilakukan dalam satu tahun tiga kali dan setiap tiga bulan sekali. Materi yang disampaikan dinas perhubungan kepada juru parkir resmi diantaranya penataan parkir yang sesuai dengan marka, keselamatan, kelancaran, kemananan dalam melaksakan tugas perparkiran, serta kedisiplinan dan juga kejujuran dan tidak boleh meminta uang redistribusi parkir kepada pengguna jasa layanan parkir berlangganan.

c). Memonitoring Juru Parkir

Pengawasan kepada kegiatan pengelolaan parkir tepi jalan umum, bertujuan guna untuk mengetahui penyimpangan yang telah terjadi di dalam kondisi lapangan seperti, terjadinya penyimpangan yang terkait dengan tugas dan tanggung jawab yang telah ditentukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar yang telah didelegasikan kepada juru parkir resmi. Dinas Perhubungan juga telah melaksanakan monitoring rutin setiap seminggu 2 kali dengan melakukan sidak di lapangan.

Seperti yang dikatakan oleh bapak Huda staf parkir: *“dari kita tim monitor itu langsung terjun kelapangan meneui jukir dengan waktu yang tentative artinya tidak tertera waktu harus jam berapa tidak karena tujuan kita untuk paker itu sistimnya sidak, pertama tujuan kita untuk jukir adalah untuk mendisiplinkan jukir yang kedua secara tidak langsung kita juga langsung terjun ke masyarakat untuk sosialisasi program parkir berlangganan”*.

d). Memberikan Sanksi Yang Tegas Dan Nyata Bagi Jukir Yang Tidak Menaati Aturan.

Memberikan sanksi yang tegas dan nyata diperlukan agar jukir-jukir yang tidak mentaati aturan mendapatkan efek jera. Seperti yang dikemukakan

oleh Bapak Yudi selaku kasi perparkiran: *“kita sudah mensosialisasikan kepada Jukir bahwa menerima memunggut itu tidak di perbolehkan dan di kontrak sudah di tuiskan kalo mereka memunggut atau menerima uang akan di berikan sanksi secara tegas dan bisa di behentikan.”*

Dalam surat perjanjian kerja juga telah dijelaskan tentang tugas pokok dan kewajiban juru parkir sehingga dapat dipatuhi dan ditaati sebagai mana mestinya, pihak dinas perhubungan hanya bisa berupaya memonitoring serta meluruskan dan menjalankan sesuai dengan perjanjian yang ada.

4.3 Hasil Kuesioner Pertanyaan Terbuka Responden Masyarakat Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar

Untuk memperkuat hasil penelitian dari rumusan masalah yang sudah ada diperlukan jumlah responden masyarakat sebanyak 50 orang dengan memberikan beberapa pertanyaan terbuka sebagai dasar untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan masyarakat tentang program parkir berlangganan serta peran Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar dalam menjalankan program parkir berlangganan.

4.3.1 Rekap Jawaban Pertanyaan Terbuka Responden

Dewa (2019) menyebut bahwa pertanyaan terbuka (open-ended question) diperlukan untuk mendalam pembahasan implikasi manajerial. Pemilihan subjek berdasarkan anggapan responden memiliki informasi yang relevan dengan studi ini. Langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut :

- a) Mempersiapkan dokumen utama yang terdiri atas transkrip wawancara yang telah dilakukan dengan responden.
- b) Melakukan pengkodean yaitu memilih kode kata yang bermakna dan sesuai dengan tujuan penelitian.
- c) Melakukan pembahasan berdasarkan kesesuaian hasil analisis kuantitatif.

Hasil jawaban dari 50 responden masyarakat Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar terhadap pertanyaan terbuka mengenai peran Dinas

Perhubungan Kabupaten Blitar dalam melaksanakan program parkir berlangganan dapat dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 4.2 Jawaban Responden Pertanyaan Terbuka

Pertanyaan Terbuka	Tanggapan Responden	Skor
No.1 Bagaimana pendapat anda mengenai program parkir berlangganan apakah sudah berjalan dengan baik atau belum berikan alasannya?	Belum karena masih banyak juru parkir ilegal	14
	Belum masih di tarik retribusi	7
	Tidak tahu	4
	Menurut saya program tersebut belum berjalan dengan baik, karena masih banyak masyarakat yang belum paham	16
	Menurut saya sudah baik tetapi kedepannya lebih di perbaiki lagi dan di sosialisasikan	8
	Tidak setuju karena belum di sosialisasikan	1
No.2 Apakah Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar pernah melaksanakan kegiatan sosialisasi program parkir berlangganan, jika pernah di sosialisasikan seperti apa caranya?	Belum pernah lihat	33
	Pernah, Dinas Perhubungan mensosialisasikan melalui media social seperti FaceBook, Sehingga bayak orang awam yang tidak mengetahui program tersebut	9
	Sudah dari mulut kemulut	3
	Pernah di beberapa tempat	5

Pertanyaan Terbuka	Tanggapan Responden	Skor
No.3 Dalam membayar pajak program parkir berlangganan masyarakat di berikan sebuah bukti pembayaran berupa stiker yang bertanda sebagai sebuah bukti jika sudah membayar pajak, apakah stiker tersebut sudah efisien, jika tidak apa alasannya?	Sudah tetapi masih banyak yang belum menempel di kendaraan	7
	Belum efisien karena bahan stiker kurang bagus dan kurang menarik	17
	Belum efisien karna masih ditarik retribusi	1
	Sudah, tapi lebih di sosialisasikan lagi agar masyarakat lebih paham dan mengerti	20
	Tidak karena program ini berlaku hanya di tempat tertentu yang ada jukir resminya	3
	Saya tidak tahu	2
No.4 Apakah tindakan anda sebagai masyarakat bila di tarik retribusi oleh juru parkir?	Membayar dari pada rusuh	22
	Jika juru parkir ini resmi saya akan menolak membayarnya karena kami sudah membayar pajak program parkir berlangganan	22
	Akan menanyakan perihal program parkir berlangganan	2
	Tidak masalah asal bisa membuat nyaman saat parkir	2
	Menolak	2
No.5 Kritik dan	Tambah lagi juru parkir resminya	14

saran terhadap program parkir berlangganan yang ada di Kabupaten Blitar?	Untuk lebih di tertibkan juru parkir-juru parkir di Wilayah Kabupaten Blitar	8
	Tingkatkan lagi dan lebih di sosialisasikan bukan hanya di social media	26
	Kurang mantap dan kurang profesional	2

1. Berdasarkan tabel pertanyaan terbuka pada pertanyaan pertama (1) yang memberikan pertanyaan “Bagaimana pendapat anda mengenai program parkir berlangganan apakah sudah berjalan dengan baik atau belum berikan alasannya? tingkat frekuensi tentang jawaban responden berkaitan dengan pertanyaan terbuka yang diajukan oleh peneliti kepada responden, jawaban responden yang menyatakan bahwa:

Sebanyak 16 responden menyatakan bahwa program tersebut belum berjalan dengan baik karena masih banyak masyarakat yang belum paham tentang program tersebut serta 14 responden menyatakan bahwa belum baik karena masih banyak juru parkir ilegal juga 8 responden menyatakan bahwa program tersebut sudah baik namun harus lebih disosialisasikan lagi dan ada 4 responden yang tidak tahu tentang program tersebut serta 1 responden tidak setuju karena merasa belum disosialisasikan.

Dari hasil jawaban responden di atas dapat disimpulkan bahwa lebih banyak masyarakat yang tidak setuju bahwa program tersebut berjalan dengan baik, masyarakat merasa bahwa program tersebut kurang disosialisasikan dan banyak yang belum tahu dan mengerti, dan menyatakan bahwa masih banyak juru parkir ilegal yang membuat program tersebut belum berjalan dengan baik bahkan beberapa masyarakat menjawab tidak tahu dan belum pernah mendapat sosialisasi mengenai program tersebut.

Perlu menjadi sebuah perhatian untuk Dinas Perhubungan khususnya bidang perparkiran bahwa masyarakat menginginkan program

tersebut disosialisasikan secara menyeluruh dan penambahan juru parkir resmi yang harus segera ditambah untuk meningkatkan ke efektifan program parkir berlangganan.

2. Berdasarkan tabel pertanyaan terbuka pada pertanyaan kedua (2) yang memberikan pertanyaan “Apakah Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar pernah melaksanakan kegiatan sosialisasi program parkir berlangganan, jika pernah disosialisasikan seperti apa caranya?” tingkat frekuensi tentang jawaban responden berkaitan dengan pertanyaan terbuka yang diajukan oleh peneliti kepada responden, jawaban responden yang menyatakan bahwa:

Sebanyak 33 responden menyatakan belum pernah melihat tentang program parkir berlangganan serta 9 responden pernah melihat di media social facebook, 3 responden mengetahui dari pembicaraan orang lain, 5 responden pernah melihat di beberapa tempat tertentu.

Dari pernyataan di atas dapat di ketahui bahwa Dinas perhubungan masih kurang baik dalam melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat yang diketahui dari pertanyaan terbuka di atas bahkan separuh lebih masyarakat merasa belum pernah melihat sosialisasi tersebut.

3. Berdasarkan tabel pertanyaan terbuka pada pertanyaan ketiga (3) yang memberikan pertanyaan “Dalam membayar pajak program parkir berlangganan masyarakat diberikan sebuah bukti pembayaran berupa stiker yang bertanda sebagai sebuah bukti jika sudah membayar pajak, apakah stiker tersebut sudah efisien, jika tidak apa alasannya?” tingkat frekuensi tentang jawaban responden berkaitan dengan pertanyaan terbuka yang diajukan oleh peneliti kepada responden, jawaban responden yang menyatakan bahwa:

Sebanyak 20 responden menyatakan bahwa stiker tersebut sudah efisien tetapi perlu di sosialisasikan lagi kepada masyarakat, 17 responden menyatakan bahwa stiker tersebut tidak efisien dan menganggap kurang bagus dan kurang menarik, 7 responden menyatakan bahwa stiker tersebut sudah efisien tetapi masih banyak masyarakat yang belum menempel, 4

responden menyatakan masih kurang efisien karena masih ditarik retribusi, dan 2 responden tidak mengetahui stiker tersebut.

Dari pernyataan di atas diketahui bahwa separuh lebih responden masyarakat menyatakan bahwa stiker tersebut sudah efisien tetapi masih sangat perlu disosialisasikan lagi mengenai fungsi dan kegunaan stiker tersebut dan separuh lagi responden masyarakat menyatakan bahwa stiker tersebut tidak efisien karena stiker dianggap kurang bagus dan menarik serta merasa percuma walaupun sudah punya tetapi masih ditarik retribusi serta 2 responden tidak mengetahui stiker tersebut.

4. Berdasarkan tabel pertanyaan terbuka pada pertanyaan keempat (4) yang memberikan pertanyaan “Apakah tindakan anda sebagai masyarakat bila ditarik retribusi oleh juru parkir?” tingkat frekuensi tentang jawaban responden berkaitan dengan pertanyaan terbuka yang diajukan oleh peneliti kepada responden, jawaban responden yang menyatakan bahwa:

Sebanyak 22 responden menyatakan akan tetap membayar daripada rusuh dan rebut, 22 responden menyatakan tidak mau membayar bila itu juru parkir resmi, 2 responden menolak dan 2 responden menyatakan tidak masalah asalkan nyaman dan aman, 2 responden masih mempertanyakan kepada juru parkir mengenai program parkir berlangganan.

Dari data di atas dapat dinyatakan bahwa separuh dari masyarakat tidak mau mengambil pusing hanya karena uang yang tidak seberapa membuat ribut dengan juru parkir dan separuh lagi menyatakan bahwa tidak akan membayar bila itu juru parkir resmi tetapi masih mau membayar bila itu juru parkir ilegal karena mereka tidak digaji oleh pemerintah, ada 2 masyarakat yang menolak dengan tegas dan 2 masyarakat yang masih mau memberi tapi dengan mempertanyakan program tersebut dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat berharap agar juru parkir resmi ditambah agar program tersebut berjalan dengan baik dan tidak menyalahkan juru parkir ilegal karena mereka secara tidak langsung juga membantu masyarakat.

5. Berdasarkan tabel pertanyaan terbuka pada pertanyaan kelima (5) yang memberikan pertanyaan “Kritik dan saran terhadap program parkir berlangganan yang ada di Kabupaten Blitar?” tingkat frekuensi tentang jawaban responden berkaitan dengan pertanyaan terbuka yang diajukan oleh peneliti kepada responden, jawaban responden yang menyatakan bahwa:

Sebanyak 26 responden masyarakat berharap agar program parkir tersebut lebih ditingkatkan dan disosialisasikan secara menyeluruh bukan hanya lewat media social, 14 responden menyatakan untuk ditambah lagi juru parkir resminya, 8 responden menyatakan agar lebih ditertipkan lagi juru parkir di seluruh wilayah Kabupaten Blitar bukan hanya di wilayah Kecamatan Wlingi, 2 responden menyatakan bahwa kinerja dari Dinas Perhubungan (Bidang Perparkiran) kurang mantap dan professional.

Dari pernyataan di atas dapat dinyatakan bahwa sebagian besar masyarakat dari 50 responden menginginkan untuk selalu di sosialisasikan lagi kepada masyarakat dan meminta untuk di tambah lagi juru parkirnya dan di tingkatkan lagi kinerja juru parkir dan semua pihak yang terkait.

4.4 Implikasi Manajerial

Uraian hasil pembahasan diatas membuktikan bahwa peran Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar sangat berpengaruh terhadap program parkir berlangganan, hal ini dibuktikan dengan hasil data yang diperoleh dari masyarakat bahwa peran Dinas Perhubungan berpengaruh terhadap keberhasilan program tersebut. Dalam observasi di lapangan dengan data yang diperoleh dari responden masyarakat adalah sama. Dalam mengkaitkan hasil penelitian dengan peranan terhadap penilaian memiliki implikasi sebagai berikut :

- a. Diketahui bahwa peran Dinas Perhubungan dalam melakukan sosialisasi sangat berpengaruh terhadap pengetahuan masyarakat. Dalam hasil penelitian diperoleh bahwa masyarakat masih merasa belum menerima sosialisasi sepenuhnya ditunjukkan dengan sebagian besar masyarakat yang

belum mengetahui dan sebagian kecil sudah mengerti dengan program tersebut. Dalam observasi di lapangan Dinas Perhubungan telah melaksanakan sosialisasi di Samsat pada saat masyarakat akan menerima bukti stiker pembayaran pajak program parkir berlangganan dan diketahui juga telah mensosialisasikan di media social facebook tetapi sudah lama tidak di update kembali serta di lapangan pada lingkup masyarakat yang lebih luas tidak pernah dilakukan sosialisasi seperti dengan penempelan stiker pada tempat-tempat parkir dengan permasalahan seperti ini Dinas Perhubungan dapat melaksanakan sosialisasi lebih giat dengan menyebarkan spanduk atau bener sosialisasi program parkir berlangganan dan bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk mensosialisasikan program tersebut ke desa-desa melalui kelurahan dan seterusnya.

- b. Penempelan stiker pada kendaraan bermotor juga merupakan rencana Dinas Perhubungan dalam melaksanakan program parkir berlangganan yang pada kenyataannya belum sesuai dengan rencana Dinas Perhubungan sebagai bukti telah membayar pajak. Dalam hasil penelitian diketahui bahwa masyarakat kurang puas dengan cara tersebut karena masih banyak masyarakat yang tidak menempelkan stiker tersebut pada kendaraan mereka dengan alasan stiker tersebut kurang menarik dan mudah rusak bila terkena hujan dan panas secara terus menerus dan dapat hilang dicuri orang. Observasi dilapangan juga membuktikan bahwa pernyataan masyarakat tersebut memang benar adanya yaitu sebagian besar masyarakat tidak menempelkan stiker tersebut dengan hal ini Dinas Perhubungan dapat mensiasati stiker tersebut dengan tanda di plat nomor agar masyarakat tidak repot harus menempelkan pada kendaraan dan tidak khawatir akan hilang
- c. Kurangnya juru parkir resmi Dinas perhubungan Kabupaten Blitar juga menjadi permasalahan bagi Dinas Perhubungan dalam mensukseskan program parkir berlangganan. Diketahui dari hasil penelitian bahwa memang sebagian masyarakat mengeluhkan tentang banyaknya juru parkir ilegal dibanding dengan juru parkir resmi dengan luas wilayah Kecamatan

Wlingi yang sangat luas yang hanya memiliki juru parkir resmi sebanyak 25 orang sesuai dengan data juru parkir tahun 2020 dirasa sangat kurang. Sesuai dengan data yang di peroleh saat pelaksanaan penelitian dalam pelaksanaan observasi di lapangan memang benar di lapangan sesuai dengan apa yang diperoleh dalam pengambilan data. Penambahan juru parkir sangat berpengaruh terhadap keberhasilan program tersebut jumlah tersebut dirasa sangat kurang dan untuk meningkatkan keberhasilan program tersebut minimal juru parkir pada tiap-tiap wilayah harus sebanding dan menyesuaikan keadaan daerah tersebut.

- d. Peran Dinas Perhubungan dalam melaksanakan program parkir berlangganan ialah dengan memberikan pelayanan yang memuaskan diantaranya adalah sikap juru parkir resmi dalam melayani masyarakat. Dari hasil yang diperoleh dari responden masyarakat diketahui masyarakat merasa belum puas dengan kinerja juru parkir disamping masyarakat sudah paham atau belum dengan perbedaan juru parkir resmi dan ilegal masyarakat masih mengeluhkan bahwa masyarakat masih seringkali ditarik retribusi parkir dilapangan. Sesuai dengan hasil observasi di lapangan diketahui bahwa memang juru parkir resmi tidak meminta retribusi parkir kepada masyarakat tetapi masih mau menerima uang retribusi bila diberi oleh masyarakat tanpa memberitahukan atau menanyakan tentang program parkir berlangganan terlebih dahulu hal ini dapat ditangani dengan penindakan juru parkir yang tegas apabila tidak ikut serta mensosialisasikan dan kedapatan masih menerima uang retribusi dari masyarakat.

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan maka dilakukan kajian secara teoritis oleh peneliti dan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Peran Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar dalam melaksanakan program parkir berlangganan di Kecamatan Wlingi antara lain: Pertama, Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar menyediakan layanan program parkir berlangganan ini untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan parkir yang memadai, aman, dan terjangkau. Peran Dinas Perhubungan sebagai pengatur penetapan tarif retribusi ini guna untuk melakukan pengaturan, pembinaan, mengendalikan dan juga pengawasan atas pemanfaatan fungsi ruang yang sudah ditetapkan. sebagai sarana lahan parkir guna melindungi kepentingan pelayanan umum kepada masyarakat. Kedua, Dinas Perhubungan sebagai pengarah ditunjukkan dengan adanya program-program yang dilaksanakan seperti memberikan penyuluhan kepada juru parkir resmi setiap sebulan sekali agar juru parkir resmi dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan yang telah disepakati. Ketiga, Peran Dinas Perhubungan sebagai pelaksana program parkir berlangganan ditunjukkan dengan adanya Sosialisasi kepada masyarakat dan pemasangan banner.
2. Kendala Dinas Perhubungan dalam melaksanakan program parkir berlangganan di wilayah Kecamatan Wlingi antara lain: Pertama, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap program parkir berlangganan masyarakat tetap membayar parkir pada juru parkir resmi walaupun tidak diminta dan sering kali masyarakat tidak menempelkan stiker bukti bahwa masyarakat sudah membayar parkir berlangganan. Kedua, banyak masyarakat yang tidak menempel stiker bukti membayar program parkir berlangganan masyarakat terlalu mengabaikan hal itu dan sangat jarang ditemui kendaraan yang plat nomornya ditemplei stiker. Masyarakat beranggapan bahwa stiker yang ditempelkan pada plat nomor akan memperjelek penampilan montor, selain itu masyarakat enggan menempelkan karena stiker mudah rusak jika terkena air dan panas secara terus menerus. Ketiga, kurangnya juru parkir resmi, wilayah Kecamatan Wlingi sangat luas akan tetapi hanya ada 25 juru parkir yang resmi. Keempat, kurangnya petugas monitoring juru parkir. Kurangnya petugas monitoring juga menjadi kendala dalam pelaksanaan program parkir berlangganan ini karena setiap melakukan monitoring dalam satu tim hanya

ada 2 petugas dan itupun sangat minim sekali, dengan wilayah Kabupaten Blitar yang sangat luas mengakibatkan monitoring ini kurang efisien. Kelima, sikap juru parkir. Sikap juru parkir resmi dalam melakukan tugasnya masih memiliki sikap yang belum memadai. Dalam praktek pelayanan parkir tepi jalan umum ditemui masih banyaknya petugas juru parkir resmi masih mendapat kritikan oleh masyarakat, dikarenakan akibat jukir kurang memberikan sikap responsive.

3. Upaya Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar dalam menangani kendala program parkir berlangganan memberikan sosialisasi kepada masyarakat, memberikan pembinaan kepada juru parkir, memonitoring juru parkir, memberikan sanksi yang tegas dan nyata untuk juru parkir yang melanggar aturan.

5.2 SARAN

Berdasarkan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai “Peran Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar Dalam Melaksanakan Program Parkir Berlangganan Di Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar”. Saran dari penelitian ini ditujukan kepada beberapa pihak sebagai berikut.

1. Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar.

Sebaiknya Dinas Perhubungan dalam melaksanakan program parkir berlangganan langkah pertama harus terlebih dahulu mensosialisasikan kepada masyarakat. Melihat perkembangan teknologi Dinas Perhubungan dapat mensosialisasikan melalui media sosial dengan konsisten dan terus menerus dan dapat dilaksanakan dengan meminta bantuan Pemerintah Daerah dengan memberikan sosialisasi kepada tiap-tiap desa dengan memberitahukan kepada Kepala Desa atau lebih secara luas di sosialisasikan ke setiap lingkup Rt/Rw dengan secara lisan dan tertulis. Serta perlu sekali penambahan juru parkir resmi agar penarikan retribusi liar dapat dikendalikan. Penempelan stiker juga dapat dilakukan dengan memberikan tanda diplat nomor agar lebih efisien dan mengurangi dana untuk pembuatan stiker selain itu untuk meningkatkan kinerja juru parkir dapat dengan memberikan sanksi yang tegas apabila juru

parkir tidak menanyakan perihal program parkir berlangganan dengan juru parkir memberikan atau menanyakan perihal program parkir berlangganan juru parkir secara tidak langsung ikut mensosialisasikan kepada masyarakat.

2. Prodi Manajemen Transportasi

Diharapkan memberikan dukungan kepada para peneliti agar menjalankan penelitian lebih semangat dan baik serta memberikan informatif, pengetahuan dan referensi kepada peneliti.

3. Peneliti Lanjutan

Sebagai pembelajaran dalam melakukan penelitian selanjutnya dan dapat melakukan penelitian lebih mendalam bagaimana peran Dinas Perhubungan dalam melaksanakan program parkir berlangganan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adenantha L Dewa, Izza Mafruhah, Nugroho SB Maria, Mudjahirin Thohir, Indah Susilowati, 2019, *Model of Port Management to Improve the Service Quality For Passengers, Quality Access to Success*, Volume 20 (No. 173) : 32 – 38
- Aldino, Azjandri.2017.”Dampak Munculnya Juru Parkir Ilegal Terhadap RetribusiParkir Kota Tanjungpinang Tahun 2016”. *Jurnal Universitas Maritim Raja Ali HajiTanjungpinang*. (online),(http://jurnal.umrah.ac.id/wpcontent/uploads/gravity_forms/1ec61c9cb232a03a96d0947c6478e525e/2017/08/JURNAL73.pdf). Diakses 19 November 2020.
- Andriani, Dury dkk. 2012. *Metode Penelitian*. Tangerang:Universitas Terbuka.
- Edi, Fandi Rosi Sarwo. 2016. *Teori Wawancara Spikodiagnostik*. Yogyakarta: LeutikaPrio.
- Gay, LR, Geoffrey E. Mills and Peter Airasian. 2009. *Educational Research, Competencies for Analysis and Application*. New Jersey: Pearson Education, Inc.

- Gustika, Gita Sari.2018."Pengaruh Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Indragiri Hulu." *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*. 7(4): 114-122.
- Ilhamsyah, Randi.2016. "Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi SAMSAT Kota Malang)." *Jurnal Mahasiswa Perpajakan*. 8 (9). 1-9.
- Komariah, Tri. 2009.*Penelitian Kualitatif*,(Online), (.SHA256&XAmzCredential=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A%2F20191201%2Ffuseast1%2Fs3%2Faws4_request&XAmzDate=20191201T073706Z&XAmzExpires=3600&XAmzSignedHeaders=host&XAmzSignature=44c1201034afbba0b7774c2b894e50c92146a007d9e8dca9cd7449e6ba242dc3) diakses 26 Februari 2021.
- Limantara, Arthur Daniel, Yosef Cahyo Setianto Purnomo, and Sri Wiwoho Mudjanarko.2017. "Pemodelan Sistem Pelacakan LOT Parkir Kosong Berbasis Sensor Ultrasonic Dan Internet Of Things (IOT) Pada Lahan Parkir Diluar Jalan." *Jurnal Prosiding Semnastek* .06: 1-10.
- Moleong, Lexy. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung:PT Remaja Rosdakarya.
- Patilima, Hamid. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Peraturan Pemerintah TAHUN 2014, Tentang Peraturan Dinas Perhubungan Tahun, 2014.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015, tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor.(https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2015/5TAHUN2015PERPRE_S.pdf). Diakses 28 Maret 2021.
- Rahmat, Pupu Saeful. 2012. Penelitian Kualitatif. *Jurnal Penelitian Kualitatif*. (Online), (<http://yusuf.staff.ub.ac.id/files/2012/11/Jurnal-Penelitian-Kualitatif.pdf>), diakses 20 Februari 2021.
- Rande, Dina. 2017. "Pengaruh kompetensi terhadap kinerja pegawai pada dinas perhubungan, komunikasi dan informatika kabupaten mamuju utara." *Katalogis* . 4 (2).101-109
- Regah, T Ryan , Harijanto Sabjino , Sherly Pinatik.2019. Analisis Pendidikan, Pengalaman Kerja Dan Pelatihan Pada Pelayanan Aparatur Pajak Di

UPTD SAMSAT Amurang. *Jurnal Riset Akutansi Going Concernt*. 14 (1). 64-72.

Seksi Bidang Parkir.2020. Surat Perjanjian Kerja Harian. Nomor : 800/409.107.2/ 2020. Dinas Perhubungan, Kabupaten Blitar.

Siregar, Dina Nurrahmah, and Yanis Rinaldi.2017. "Peranan Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Dalam Pelaksanaan Pengawasan Parkir Di Kota Banda Aceh." *Jurnal IlmiahMahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan 1* (1): 194-205.

Sugiyono. 2016-2017. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung:Alfabeta.

Taruno, Hendrawan Toni. 2017. "Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Parkir Studi Kasus: Kota Semarang." *Journal of Governance*. 2 (2): 186-201

Ulfatin, Nurul. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*. Malang: Media Nusa Creative.

UU REPUBLIK INDONESIA No.38Tahun 2004,(<http://itjen.kemenag.go.id/sirandang/peraturan/1565-38-undang-undang-nomor-38-tahun-2004-tentang-jalan>.) . Diakses 28 Maret 2021.

UU REPUBLIK INDONESIA no.22tahun2009.
(https://pih.kemlu.go.id/files/uu_no22_tahun_2009.pdf) .Di akses 29 Maret 2021.

Varizie, Rihan, and Talbani Farlian. 2019."Analisis Pengaruh Parkir Liar Terhadap Pendapatan Pemilik Usaha Di Kota Banda Aceh." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Pembangunan* 4 (3): 273-280.

Widawati, Ayu, and S. H. Muchamad Iksan.2016. Peran Dan Tanggung Jawab Dishub (Dilajr) Dalam Penegakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. *Diss. Universitas Muhammadiyah Surakarta*. (<http://eprints.ums.ac.id/42082/>). Diakses 28 Maret 2021.

Yin, Robert K. 2002. *Studi Kasus:Desain dan Metode*. Jakarta:UI Press.